

LAPORAN HASIL PEKERJAAN



LAPORAN HASIL PEKERJAAN PENDAMPINGAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PASURUAN



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Belanja Jasa Konsultansi Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Hasil dari terlaksananya kegiatan Jasa Konsultansi Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 ini bisa menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Pasuruan yang pada akhirnya akan tergambarkan pada nilai Indeks Pembangunan Statistik yang dicapai.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk ide, saran, dan masukan yang sangat berarti. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan ini, termasuk Perangkat Daerah dan seluruh tim yang terlibat.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah, akademisi, maupun masyarakat luas dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data.

Pasuruan, 27 November 2025

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pasuruan**



FIRDAUS HANDARA, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 198402272003121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN	4
1.3.1 Maksud Kegiatan	4
1.3.2 Tujuan Kegiatan.....	5
1.3.3 Manfaat Kegiatan.....	6
BAB II. KONSEP, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI.....	8
2.1 KONSEP EPSS	8
2.1.1 Tahapan kematangan organisasi.....	8
2.1.2 Struktur penilaian EPSS.....	9
2.2 Konsep Satu Data	12
2.2.1 Satu Data Indonesia.....	12
2.2.2 Data.....	13
2.2.3 Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	14
2.3 Metodologi Kegiatan.....	14
2.3.1 Sumber Data	15
2.3.2 Langkah-Langkah Kegiatan	15
BAB III LOKASI DAN KELUARAN KEGIATAN	17
3.1 Lokasi Kegiatan	17
3.2 Keluaran Kegiatan	18
BAB IV. RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA DAN WALIDATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PASURUAN	19
BAB V. PEDOMAN PELAKSANAAN STATISTIK SEKTORAL.....	157
BAB VI. SOP	160
BAB VII PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PORTAL SATU DATA KABUPATEN PASURUAN	161
BAB VIII. PENUTUP.....	163
LAMPIRAN	164

1 BAB I.

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar konseptual dan konteks pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2025. Penjelasan dalam bab ini mencakup landasan pemikiran, dasar hukum, serta arah dan tujuan kegiatan yang menjadi kerangka kerja bagi pelaksanaan pendampingan. Melalui penyusunan bab pendahuluan ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang utuh mengenai urgensi, maksud, dan sasaran kegiatan, sehingga keseluruhan laporan memiliki kejelasan arah dan relevansi terhadap kebijakan pembangunan daerah.

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan statistik sektoral merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan tata kelola pemerintahan berbasis data. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menegaskan bahwa kegiatan statistik harus diarahkan untuk mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien. Melalui penyelenggaraan statistik sektoral, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan data yang relevan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perumusan kebijakan publik. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan statistik sektoral berjalan sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan daerah.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Pasuruan masih memerlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman teknis antarperangkat daerah terhadap prinsip Satu Data Indonesia serta belum optimalnya konsistensi dalam pengumpulan dan pelaporan data sektoral. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap keterisian data dan ketepatan indikator pembangunan yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pendampingan penyelenggaraan

statistik sektoral menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola data dan meningkatkan integrasi informasi di tingkat daerah.

Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan sistem data yang terintegrasi, terstandar, dan terdokumentasi dengan baik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sebagai walidata memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan Forum Satu Data, memfasilitasi interoperabilitas antarperangkat daerah, serta menjamin pemanfaatan data yang optimal. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral juga berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral, yang mengatur mekanisme koordinasi antara pembina data, walidata, dan produsen data untuk menjamin keseragaman standar, metadata, serta kualitas data statistik yang dihasilkan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan penyelenggaraan statistik sektoral diperlukan agar penyusunan rencana aksi, pedoman teknis, dan petunjuk pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan nasional serta mendukung efektivitas penyelenggaraan statistik di daerah.

Dalam kerangka pembangunan statistik daerah, peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Indeks ini merupakan instrumen pengukuran yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai tingkat kematangan pelaksanaan statistik sektoral pada instansi pemerintah. Peningkatan nilai IPS mencerminkan kemajuan dalam tata kelola data yang berdampak pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Oleh sebab itu, kegiatan pendampingan yang dirancang secara terencana dan terukur diharapkan dapat memperkuat capaian IPS Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara berkelanjutan.

Dalam konteks reformasi birokrasi, peningkatan kualitas data sektoral juga menjadi prasyarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis kinerja. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data yang valid, konsisten, dan mudah diakses menjadi landasan utama bagi pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan

pendampingan penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat ekosistem data, meningkatkan sinergi antarperangkat daerah, serta mendukung transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.

1.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan kegiatan *Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2025* berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan statistik, pemerintahan daerah, serta kebijakan nasional mengenai sistem data terintegrasi. Dasar hukum ini berfungsi sebagai pedoman normatif dan yuridis yang memastikan kegiatan pendampingan berjalan sesuai prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keselarasan dengan kebijakan nasional. Dengan berpedoman pada ketentuan tersebut, kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan standar penyelenggaraan statistik sektoral yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah pedoman peraturan:

1. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
4. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

1.3 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.3.1 Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah memberikan dukungan teknis dan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka memperkuat tata kelola data sektoral yang terintegrasi, akurat, dan berkesinambungan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan statistik sektoral, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi data, berjalan sesuai dengan prinsip *Satu Data Indonesia* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Sesuai dengan kerangka kerja EPSS yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik melalui Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat implementasi dimensi-dimensi utama EPSS, yaitu:

1. Kelembagaan statistik sektoral yang mendukung koordinasi antarperangkat daerah
2. Sumber daya manusia statistik yang kompeten dan memahami kaidah statistik resmi
3. Proses bisnis statistik yang sesuai dengan standar dan metodologi BPS
4. Manajemen data dan metadata yang terintegrasi dalam kerangka Satu Data Indonesia

Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia di perangkat daerah dalam pengelolaan data sektoral. Melalui proses pendampingan, diharapkan setiap perangkat daerah mampu memahami dan menerapkan standar metadata, kode referensi, serta mekanisme interoperabilitas data yang selaras dengan kebijakan nasional. Hal ini sejalan dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan sebagai walidata, yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan statistik sektoral dan memastikan keterpaduan antarprodusen data daerah.

Kegiatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam memperkuat ekosistem data daerah. Pendampingan dilaksanakan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi, pedoman teknis, serta petunjuk

pelaksanaan yang relevan dengan kondisi lokal Kabupaten Pasuruan. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS), sekaligus mendukung transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang berbasis data (*data-driven governance*).

Kegiatan pendampingan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan statistik sektoral yang berstandar, berorientasi hasil, dan berkelanjutan. Melalui pendekatan pendampingan yang sistematis dan kolaboratif, Pemerintah Kabupaten Pasuruan diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi statistik sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah secara lebih efektif dan terukur.

1.3.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Secara rinci, tujuan kegiatan ini meliputi hal-hal berikut:

1. Meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Pasuruan.
Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah mencapai peningkatan skor IPS melalui perbaikan tata kelola data sektoral. Fokusnya adalah pada penguatan aspek kelembagaan, perencanaan statistik, pengumpulan data, serta dokumentasi bukti dukung sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Memperkuat penerapan prinsip *Satu Data Indonesia*.
Pendampingan dilakukan agar perangkat daerah mampu menerapkan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Hal ini mencakup keseragaman standar data, penggunaan metadata, dan mekanisme interoperabilitas antarinstansi, sehingga data sektoral dapat digunakan secara terpadu dan efisien.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia.
Kegiatan pendampingan memberikan asistensi teknis dan pelatihan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola data sektoral. Dengan meningkatnya kapasitas SDM, diharapkan proses

pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dapat dilakukan secara mandiri, sistematis, dan berkesinambungan.

4. Menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi penyelenggaraan statistik sektoral.
Pendampingan diarahkan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi konkret, pedoman teknis, serta petunjuk pelaksanaan statistik sektoral dan walidata. Dokumen-dokumen ini menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis data (*data-driven governance*).
Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah membangun budaya kerja berbasis data di seluruh perangkat daerah. Dengan data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi, proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih objektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, kegiatan pendampingan ini diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem statistik daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, serta mendukung keberhasilan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Pasuruan.

1.3.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 adalah terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola data sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui pendekatan sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Secara lebih rinci, sasaran kegiatan ini mencakup:

1. Meningkatkan Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Pasuruan.
Sasaran utama dari kegiatan pendampingan ini adalah peningkatan capaian IPS sebagai indikator kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Kegiatan difokuskan pada pemenuhan bukti dukung dan penyusunan dokumen pendukung sesuai standar evaluasi Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Terwujudnya tata kelola data sektoral yang terintegrasi dan berstandar nasional.
Pendampingan diarahkan agar seluruh perangkat daerah memiliki mekanisme kerja yang selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia. Hal ini meliputi penerapan metadata, kode referensi, dan interoperabilitas data antarinstansi agar data sektoral dapat saling terhubung dan dimanfaatkan secara lintas sektor.
3. Tersusunnya rencana aksi dan pedoman teknis penyelenggaraan statistik sektoral.
Kegiatan ini diharapkan menghasilkan dokumen rencana aksi, pedoman teknis, dan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan resmi bagi perangkat daerah dalam menjalankan kegiatan statistik sektoral secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia perangkat daerah di bidang statistik sektoral.
Pendampingan difokuskan pula pada peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami proses penyelenggaraan statistik, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan hingga diseminasi data. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dapat berperan aktif dalam menghasilkan data yang akurat dan relevan.
5. Terwujudnya budaya kerja berbasis data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesadaran dan komitmen bersama bahwa data merupakan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan budaya data-driven governance akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.

2 BAB II.

KONSEP, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

Bab ini menjelaskan landasan konseptual, batasan ruang lingkup, serta pendekatan metodologis yang digunakan dalam penyusunan Buku EPSS Kabupaten Pasuruan. Penyusunan buku ini berorientasi pada upaya penguatan tata kelola data dan informasi statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagai bagian dari implementasi Satu Data Indonesia dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2.1 KONSEP EPSS

EPSS merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah. EPSS bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan pelaksanaan prinsip Satu Data Indonesia, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang statistik. Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana tata kelola data sektoral telah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan nasional.

2.1.1 Tahapan kematangan organisasi

Secara konseptual, EPSS mengadopsi *Capability Maturity Model (CMM)* yang menggambarkan tahapan kematangan organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Penilaian dilakukan dengan mengukur lima tingkatan kematangan, yaitu:

1. Rintisan, ketika proses statistik belum terlaksana secara menyeluruh
2. Terkelola, ketika pelaksanaan sudah berlangsung namun belum terstandar antarunit
3. Terdefinisi, ketika telah terdapat pedoman atau standar baku yang berlaku di seluruh unit
4. Terpadu dan Terukur, ketika pelaksanaan sudah saling terintegrasi dan dilakukan evaluasi berkala
5. Optimum, ketika perbaikan kualitas dilaksanakan secara berkelanjutan melalui siklus peningkatan berkesinambungan

2.1.2 Struktur penilaian EPSS

Struktur penilaian EPSS terdiri atas tiga lapis hierarki yaitu domain, aspek, dan indikator.

- Domain menggambarkan area utama penyelenggaraan statistik sektoral yang dinilai.
- Aspek menjelaskan area spesifik dalam setiap domain.
- Indikator merupakan elemen terukur yang menjadi dasar penilaian tingkat kematangan.

Untuk menilai tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, EPSS menggunakan lima domain utama sebagai kerangka penilaian. Kelima domain ini menggambarkan elemen penting yang saling berhubungan dalam membangun tata kelola data yang efektif, mulai dari penerapan prinsip Satu Data Indonesia hingga pemanfaatan data statistik dalam penguatan Sistem Statistik Nasional. Berikut adalah 5 domain sebagai berikut:

• DOMAIN •	• ASPEK & INDIKATOR •										
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi		
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik	
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data			
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi			
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik				
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Validasi	
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan			
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data	

1. Prinsip Satu Data Indonesia

Domain Prinsip Satu Data Indonesia menilai sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data yang baku dan terintegrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Domain ini mencakup empat aspek, yaitu Standar Data

Statistik (SDS), Metadata Statistik, Interoperabilitas Data, serta Kode Referensi dan/atau Data Induk. Penerapan SDS memastikan keseragaman format dan struktur data antarprodusen; metadata menjamin kelengkapan informasi deskriptif setiap data; interoperabilitas memastikan sistem elektronik dapat saling bertukar dan memanfaatkan data; sedangkan kode referensi menjamin konsistensi penggunaan acuan seperti kode wilayah, kependudukan, dan klasifikasi kegiatan.

2. Kualitas Data

Domain Kualitas Data menilai sejauh mana Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjamin mutu data yang dihasilkan oleh produsen data sektoral agar relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, serta konsisten antarperiode dan antarinstansi. Domain ini mencakup lima aspek utama, yaitu Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aksesibilitas, serta Keterbandingan dan Konsistensi. Aspek relevansi menilai kesesuaian data dengan kebutuhan pengguna; akurasi memastikan ketepatan isi data terhadap kondisi sebenarnya; aktualitas dan ketepatan waktu menilai seberapa cepat data tersedia setelah dikumpulkan; aksesibilitas menilai kemudahan pengguna dalam memperoleh dan memanfaatkan data; sedangkan keterbandingan dan konsistensi menilai keseragaman konsep, satuan, dan metode penyajian data antarperiode.

3. Proses Bisnis Statistik

Domain Proses Bisnis Statistik berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan statistik dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Domain ini mencakup empat aspek utama, yaitu Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, dan Penyebarluasan Data. Aspek perencanaan data menilai kemampuan instansi dalam mendefinisikan kebutuhan statistik, merancang desain, serta menyiapkan instrumen pengumpulan data. Aspek pengumpulan data menilai ketepatan dan keseragaman metode akuisisi yang dilakukan oleh produsen data. Aspek pemeriksaan data meliputi kegiatan pengolahan dan analisis untuk menjamin ketepatan dan keandalan hasil, sedangkan aspek penyebarluasan data menilai keteraturan serta keterbukaan proses publikasi oleh Walidata atau produsen data.

4. Kelembagaan

Domain Kelembagaan berfungsi untuk menilai sejauh mana struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan tata kelola kelembagaan mendukung penyelenggaraan statistik sektoral yang profesional dan berkesinambungan. Domain ini terdiri atas tiga aspek utama, yaitu Profesionalitas, Sumber Daya Manusia yang Memadai dan Kapabel, serta Pengorganisasian Statistik. Aspek profesionalitas menilai penerapan prinsip transparansi, objektivitas, kualitas, dan konfidensialitas data. Aspek sumber daya manusia menilai kecukupan serta kompetensi pegawai di bidang statistik dan manajemen data. Sementara itu, aspek pengorganisasian statistik menilai koordinasi, kolaborasi, dan pelaksanaan peran Walidata, termasuk keterlibatan dalam Forum Satu Data Indonesia dan kerja sama dengan BPS sebagai Pembina Data serta Perangkat Daerah sebagai Produsen Data.

5. Statistik Nasional

Domain Statistik Nasional berfungsi untuk menilai sejauh mana data sektoral yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah dimanfaatkan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, serta berkontribusi terhadap penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Domain ini mencakup tiga aspek utama, yaitu Pemanfaatan Data Statistik, Pengelolaan Kegiatan Statistik, dan Penguatan Sistem Statistik Nasional Berkelanjutan. Aspek pemanfaatan data menilai penggunaan data statistik dasar maupun sektoral dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan monitoring pembangunan. Aspek pengelolaan kegiatan statistik menilai kepatuhan terhadap mekanisme rekomendasi statistik dari BPS. Sementara aspek penguatan SSN menilai upaya pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan statistik, diseminasi data, serta pemanfaatan teknologi baru seperti *big data*.

Penilaian dilakukan melalui tiga tahapan:

1. Penilaian Mandiri, dilaksanakan oleh tim penilai internal pemerintah daerah yang menilai indikator-indikator berdasarkan bukti dukung dan penjelasan yang relevan.

2. Penilaian Dokumen, dilakukan oleh BPS melalui verifikasi terhadap bukti dukung hasil penilaian mandiri.
3. Penilaian Wawancara atau Visitasi, digunakan untuk memvalidasi kesesuaian dan keabsahan data hasil penilaian mandiri.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yang merepresentasikan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral secara keseluruhan. Nilai IPS dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu: “Memuaskan, Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang”. Nilai ini menjadi dasar dalam menyusun strategi peningkatan kapasitas kelembagaan statistik serta perencanaan tindak lanjut peningkatan mutu data sektoral di Kabupaten Pasuruan.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pelaksanaan EPSS menjadi sarana penguatan tata kelola data sektoral melalui penerapan kebijakan, pedoman, dan prosedur baku—seperti penerapan Standar Data Statistik (SDS), metadata, interoperabilitas, dan kode referensi. Setiap tingkat kematangan memerlukan bukti dukung yang konkret, seperti dokumen kebijakan, laporan reviu dan evaluasi, notulen rapat, serta hasil pemutakhiran data oleh produsen data dan Walidata. Dengan pelaksanaan EPSS, Pemerintah Kabupaten Pasuruan diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral yang terpadu, terstandar, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan berbasis data yang berkualitas.

2.2 Konsep Satu Data

2.2.1 Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dimanfaatkan secara bersama antar instansi pusat dan daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola data agar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Melalui SDI, setiap instansi pemerintah—baik di tingkat pusat maupun daerah—wajib memenuhi empat prinsip utama, yaitu:

- 1) Data harus memenuhi Standar Data
- 2) Data harus memiliki Metadata

3) Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data

4) Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Empat prinsip tersebut menjadi fondasi untuk menjamin keseragaman makna, format, dan struktur data, sehingga dapat diintegrasikan lintas sektor dan lintas wilayah.

2.2.2 Data

Dalam Perpres 39 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (2), Data didefinisikan sebagai catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Dengan demikian, data menjadi bahan baku utama informasi yang digunakan pemerintah untuk mendukung fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan.

Jenis data dalam penyelenggaraan SDI meliputi: Data Statistik, yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena tertentu; Data Geospasial, yang menjelaskan dimensi lokasi atau posisi geografis suatu objek; serta Data lainnya, seperti data keuangan, data administrasi pemerintahan, dan data operasional instansi.

- **Data Geospasial**

Menurut Pasal 1 ayat (4) Perpres 39 Tahun 2019, Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam maupun buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Data Geospasial berfungsi sebagai kerangka acuan spasial bagi integrasi data sektoral. Misalnya, data lokasi fasilitas pendidikan, jaringan irigasi, atau batas administrasi wilayah, seluruhnya harus mengacu pada peta dasar nasional dan sistem koordinat baku.

- **Standar Data**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Perpres 39 Tahun 2019, Standar Data terdiri atas lima unsur: Konsep, Definisi, Klasifikasi, Ukuran, dan Satuan. Standar Data merupakan acuan utama agar setiap produsen data menghasilkan keluaran yang sebanding, dapat diintegrasikan, dan dimanfaatkan lintas instansi. Penetapan Standar Data di tingkat daerah mengacu pada pedoman

yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat, sementara penyesuaian dilakukan oleh perangkat daerah sesuai karakteristik datanya.

2.2.3 Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Berdasarkan Pasal 19 Perpres 39 Tahun 2019, penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh: a) Pembina Data tingkat daerah; b) Walidata tingkat daerah; c) Walidata Pendukung; dan d) Produsen Data tingkat daerah. Masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dalam memastikan penerapan prinsip Satu Data Indonesia berjalan dengan baik.

Tugas masing-masing unsur penyelenggara adalah sebagai berikut:

1. Pembina Data tingkat daerah

Memberikan rekomendasi dalam perencanaan pengumpulan data, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan SDI, dan berkoordinasi dengan instansi vertikal seperti BPS atau simpul jaringan geospasial daerah.

2. Walidata tingkat daerah

Melakukan pemeriksaan kesesuaian data, menyebarluaskan data melalui Portal Satu Data Daerah, serta membina produsen data. Di tingkat kabupaten/kota, Walidata dilaksanakan oleh Bappeda.

3. Walidata Pendukung

Membantu pelaksanaan tugas Walidata, terutama dalam pengumpulan dan validasi data sektoral.

4. Produsen Data tingkat daerah

Menghasilkan data sesuai prinsip SDI, melengkapi metadata, menyampaikan data kepada Walidata, dan memberikan masukan terkait standar data dan interoperabilitas.

2.3 Metodologi Kegiatan

Metodologi kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan metodologis ini mencakup sumber data yang digunakan serta tahapan kegiatan yang dilaksanakan selama proses pendampingan.

2.3.1 Sumber Data

Kegiatan pendampingan menggunakan berbagai sumber data yang relevan dan kredibel sebagai dasar pelaksanaan analisis dan penyusunan rekomendasi. Sumber data utama meliputi:

1. Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan

Sebagai wadah koordinasi antarperangkat daerah yang berperan dalam sinkronisasi kebutuhan data, pembahasan standar data, serta validasi indikator sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

2. Walidata – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

Berfungsi sebagai koordinator pengelolaan data sektoral, walidata bertanggung jawab memastikan keseragaman format, metadata, dan kode referensi antarperangkat daerah agar data dapat diintegrasikan ke dalam *Portal Satu Data*.

3. Sekretariat Forum Satu Data – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbangda).

Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana aksi serta pedoman teknis statistik sektoral.

4. Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pasuruan sebagai Produsen Data
Menjadi sumber utama data sektoral yang dikumpulkan, diverifikasi, dan diolah dalam kegiatan pendampingan. OPD juga menjadi mitra langsung dalam proses peningkatan kapasitas dan implementasi prinsip Satu Data Indonesia.

5. E-Walidata SIPD RI dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan dokumen teknis lainnya)

Digunakan sebagai referensi dalam penyelarasan data sektoral dengan indikator pembangunan daerah serta untuk mendukung penilaian capaian *Indeks Pembangunan Statistik (IPS)*.

2.3.2 Langkah-Langkah Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan melalui beberapa tahap utama yang saling berkaitan dan berorientasi pada hasil (output-oriented). Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Meliputi rapat koordinasi awal, identifikasi kebutuhan data, serta pemetaan kondisi penyelenggaraan statistik sektoral tahun sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan statistik sektoral.

2. Tahap Literasi dan Pengumpulan Bukti Dukung

Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah mengenai prinsip dan standar statistik sektoral. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan bukti dukung dari perangkat daerah yang menjadi sampel penilaian, sesuai dengan indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).

3. Tahap Pelaksanaan Pendampingan Teknis

Meliputi kegiatan asistensi dan bimbingan teknis terhadap perangkat daerah dalam penyusunan rencana aksi, pedoman teknis, serta petunjuk pelaksanaan walidata dan geospasial. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pendampingan dan menghasilkan dokumen-dokumen utama sebagai keluaran kegiatan.

4. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan pendampingan serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi peningkatan nilai *Indeks Pembangunan Statistik (IPS)* di periode berikutnya.

3 BAB III

LOKASI DAN KELUARAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan lokasi pelaksanaan kegiatan serta keluaran yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendampingan dan penerapan kebijakan EPSS di Kabupaten Pasuruan. Uraian ini mencakup penetapan lokasi instansi atau perangkat daerah yang menjadi sasaran kegiatan, serta jenis keluaran berupa dokumen, laporan, maupun instrumen yang dihasilkan sesuai dengan tujuan kegiatan.

3.1 Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dilaksanakan di wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan secara geografis terletak di antara koordinat 7°30'–8°30' Lintang Selatan dan 112°30'–113°30' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki luas sekitar 1.474,02 km², yang terdiri atas 24 kecamatan, 24 kelurahan, dan 341 desa, dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Bangil. Kondisi wilayah yang beragam—mulai dari dataran rendah di bagian utara hingga pegunungan di bagian selatan—memberikan karakteristik sosial ekonomi yang kompleks serta potensi pembangunan yang luas, khususnya pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan ini berfokus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata daerah, serta Bappeda Litbangda sebagai sekretariat Forum Satu Data Kabupaten Pasuruan. Selain itu, kegiatan juga melibatkan berbagai Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data sektoral yang menjadi objek pendampingan teknis.

Pemilihan Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada perannya yang strategis dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta upaya peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun tata kelola data sektoral yang terintegrasi,

terstandar, dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data (*data-driven governance*).

3.2 Keluaran Kegiatan

Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 diharapkan menghasilkan sejumlah dokumen keluaran yaitu:

1. Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Satu Data
2. Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Walidata Statistik Sektoral
3. Koordinasi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Statistik Sektoral dan Standar Operasional Prosedur (SOP) per Indikator yang ada di EPSS
4. Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan

BAB IV.

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA DAN WALIDATA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN PASURUAN



1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Pasuruan memulai penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan tersebut berjalan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi dasar transformasi digital pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga mengikuti ketentuan Permen PPN/Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data SPBE sebagai pedoman teknis tata kelola data. Satu Data Indonesia bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penyelenggaraan Satu Data Indonesia menjadi fondasi penting bagi mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pasuruan pada periode 2022–2024 menunjukkan perkembangan yang terwujud melalui pengoperasian Portal Satu Data. Di sisi lain, perangkat daerah masih memerlukan penguatan dalam pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk. Kendala tersebut menyebabkan kualitas data pemerintah daerah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Situasi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas dan penyelarasan tata kelola data di seluruh perangkat daerah. Oleh sebab itu, upaya penguatan tata kelola data perlu dirumuskan secara sistematis dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Pasuruan memiliki peran strategis untuk mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara data di daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman terukur dalam memperbaiki sistem, proses, dan kualitas data yang dikelola oleh perangkat daerah. Rencana aksi tersebut memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dan selaras dengan kerangka kerja pemerintah

pusat. Dengan adanya rencana aksi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat memprioritaskan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan integrasi dan pemanfaatan data. Secara keseluruhan, dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola data yang lebih baik guna mendukung pembangunan daerah yang berbasis bukti.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Pasuruan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan data pemerintah. Dasar hukum tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024

12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 302 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Pasuruan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Pasuruan merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Pada subbab ini akan dijelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan rencana aksi:

1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Aksi

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Pasuruan ini dimaksudkan untuk:

1. Menerjemahkan kebijakan nasional terkait Satu Data Indonesia dan SPBE ke dalam kebutuhan, prioritas, dan karakteristik pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Mengintegrasikan berbagai inisiatif pengelolaan data sektoral agar tercipta keselarasan, efisiensi, dan efektivitas dalam membangun ekosistem data daerah yang terpadu.
3. Menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan mendukung budaya pemerintahan berbasis data.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Aksi

Adapun tujuan yang diharapkan didalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Pasuruan:

1. Meningkatkan kualitas data sektoral Kabupaten Pasuruan agar akurat, mutakhir, lengkap, relevan, dan konsisten, sehingga data dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.
2. Mewujudkan interoperabilitas data antar sistem dan aplikasi SPBE melalui penerapan standar data, metadata, kode referensi, dan data induk yang seragam.

3. Mendorong pemanfaatan data berkualitas untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif dan berbasis bukti.
4. Meningkatkan literasi data, kompetensi pengelolaan data, dan budaya berbagi pakai data di seluruh perangkat daerah melalui program penguatan kapasitas yang berkelanjutan.
5. Menyediakan Portal Data Kabupaten Pasuruan yang andal, mudah diakses, dan dimanfaatkan secara luas sebagai titik akses tunggal bagi data pemerintah daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

2 BAB II

PENYELENGGARA, FORUM, DAN PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN PASURUAN

2.1 PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN PASURUAN

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Pasuruan terdiri atas Pengarah dan Pelaksana, yang meliputi:

1. Pembina Data

Pembina Data terdiri dari Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.

- **Pembina Data Statistik**

Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten adalah Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Pasuruan, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasuruan.

Tugas Pembina Data Statistik :

1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah terkait penerapan prinsip Satu Data Statistik di Kabupaten Pasuruan.
2. Menetapkan dan menyediakan standar data statistik serta metadata statistik yang menjadi acuan bagi seluruh penghasil data.
3. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan teknis dalam proses perencanaan dan pengelolaan penyelenggaraan Satu Data Statistik Daerah.

- **Pembina Data Geospasial**

Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten adalah Instansi Daerah yang ditugaskan sebagai pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

Tugas Pembina Data Geospasial :

1. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada perangkat daerah dalam penerapan prinsip Satu Data Geospasial.
2. Menyusun, menetapkan, dan menyediakan standar data geospasial yang menjadi pedoman bagi pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial daerah.
3. Memberikan masukan teknis dalam perencanaan program terkait penyelenggaraan data geospasial dan integrasinya dengan sistem informasi geospasial nasional.

2. Walidata

Walidata Tingkat Kabupaten merupakan perangkat daerah yang menangani urusan statistik di Kabupaten Pasuruan, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

Tugas Walidata:

1. Menyelenggarakan proses pengumpulan, pengolahan, verifikasi, dan penyajian data serta metadata lintas sektor.
2. Mengembangkan dan mengoperasikan Portal Satu Data Kabupaten sebagai pusat layanan data.
3. Memberikan pendampingan teknis dan konsultasi statistik kepada Produsen Data.
4. Menyampaikan rekomendasi statistik kepada Produsen Data sebagai dasar penetapan data.
5. Melakukan koordinasi intensif dengan Pembina Data dalam penyelenggaraan Satu Data.
6. Melakukan pemeriksaan kualitas untuk memastikan data memenuhi prinsip Satu Data Indonesia serta persyaratan yang ditetapkan.
7. Menyelenggarakan publikasi, penyediaan akses, distribusi, dan pertukaran data kepada pengguna data.

3 BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

Bab ini menjabarkan visi, misi, dan arah kebijakan Satu Data Indonesia yang menjadi landasan penyelenggaraan tata kelola data di Kabupaten Pasuruan, guna memastikan ketersediaan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

3.1 Visi Satu Data Indonesia

Berikut adalah visi Satu Data Indonesia yang menjadi dasar penyelenggaraan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dimanfaatkan secara luas untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah:

«Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.»

3.2 Misi Satu Data Indonesia

Berikut adalah misi Satu Data Indonesia yang menjadi arah pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan pengelolaan data yang berkualitas, terpadu, dan dapat dimanfaatkan secara luas dalam penyelenggaraan pemerintahan:

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip Satu Data yang adaptif, implementasi dan berorientasi pada kebutuhan;
2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan dan aparatur penyelenggara Satu Data dan Forum Satu Data yang harmonis, efisiensi dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal Satu Data Indonesia sebagai *platform* kolaborasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan pusat penyelenggaraan data bagi penyelenggara Satu Data Indonesia dan Pengguna Data;

4. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan;
5. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan.

3.3 Arah Kebijakan Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Pasuruan mengacu arah kebijakan Satu Data Indonesia tingkat pusat yaitu mewujudkan fondasi yang kokoh dan stabilitas penyelenggaraan SDI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan data pemerintah pada agenda strategis pembangunan, serta perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

4 BAB IV

RENCANA AKSI SATU DATA KABUPATEN PASURUAN

Bab ini menyajikan rencana aksi untuk mengimplementasikan kebijakan Satu Data Kabupaten Pasuruan secara terarah dan terukur. Penyusunan rencana aksi ini berlandaskan prinsip Satu Data Indonesia yang menekankan pentingnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi-pakaikan antar instansi. Program dan kegiatan yang dicantumkan dalam bab ini diselaraskan dengan kebijakan nasional seperti Satu Data Indonesia (SDI), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kebijakan Satu Peta/JIGN, serta praktik tata kelola data yang mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada bab ini akan memuat program, kegiatan, aksi, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target yang dirancang untuk mendukung peningkatan tata kelola data pemerintah daerah dan memastikan tersedianya data sektoral yang valid, terstandar, dan terintegrasi bagi kebutuhan pembangunan Kabupaten Pasuruan.

4.1 Program, Kegiatan, dan Aksi

4.1.1 Program Peningkatan Kapasitas SDM

4.1.1.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Pasuruan

Aksi:

1. Pelatihan Kegiatan Statistik Sektoral bagi ASN pengelola data.

Aksi ini dilakukan karena banyak ASN pengelola data belum memahami teknik statistik dasar hingga lanjutan, yang menyebabkan kualitas data sektoral sering tidak konsisten dan tidak memenuhi standar SDI. Oleh karena itu, tujuan utama aksi ini adalah meningkatkan kompetensi ASN dalam mengelola data sektoral sesuai standar statistik nasional. Pelaksanaan aksi ini akan melibatkan ASN untuk mengikuti pelatihan komprehensif yang mencakup perencanaan kegiatan statistik, teknik pengumpulan data, verifikasi, hingga penyajian data sektoral melalui kelas tatap muka, studi kasus, dan praktik langsung. Sebagai contoh, pelatihan yang diikuti dapat merujuk pada standar kompetensi profesi tertentu, seperti Pelatihan

Metodologi Statistik Sektoral yang diakui atau bersertifikasi oleh lembaga profesional seperti BNSP, dengan fokus pada unit kompetensi seperti Mengolah dan Menyajikan Data Sektoral.

2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM SDI yang Terstruktur

Aksi ini dirancang sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi dua tantangan utama dalam pengembangan SDI, yaitu rendahnya kapasitas SDM geospasial dan tidak adanya mekanisme kontrol kualitas metadata yang efektif. Melalui pendekatan tiga pilar yang terintegrasi, pertama, Pelatihan Berjenjang Berbasis Kompetensi BIG difokuskan pada peningkatan kemampuan teknis OPD dalam konsep geospasial, operasional software GIS, dan penyusunan metadata sesuai standar JIGN. Kedua, Sistem Garansi dan Pendampingan Pasca-Pelatihan memastikan keberlanjutan dengan menyediakan konsultasi teknis bagi alumni pelatihan yang menghadapi kendala implementasi. Ketiga, Digital Quality Control System diwujudkan melalui Metadata Quality Control Dashboard yang secara otomatis memindai, membuat tiket perbaikan, dan memantau progres perbaikan metadata secara real-time. Dengan sinergi ini, peningkatan kapasitas tidak hanya bersifat teoritis tetapi langsung terimplementasi dalam perbaikan kualitas data yang terukur dan berkelanjutan.

3. Rekrutmen SDM ahli di bidang Teknologi Digital/Statistisi/Data Science untuk mendukung penguatan Tim SDI Kabupaten Pasuruan.

Aksi ini krusial mengingat Tim SDI kekurangan tenaga profesional yang mampu menangani analisis data, integrasi sistem, interoperabilitas, dan manajemen data modern. Tujuan yang ingin dicapai adalah memperkuat kapasitas Tim SDI melalui kehadiran SDM ahli yang dapat mendukung proses *data-driven government*. Pelaksanaan aksi ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk melakukan seleksi atau kerja sama dengan tenaga ahli, yang kemudian akan bertugas mendampingi OPD, mengembangkan *pipeline* data, meningkatkan kualitas data, dan menyediakan solusi analitik. Sebagai contoh, rekrutmen diprioritaskan untuk tenaga ahli dengan sertifikasi profesional di bidang terkait, seperti sertifikasi Data Scientist atau memiliki pengalaman kerja minimal X tahun

dalam pengembangan sistem integrasi data berbasis API (*Application Programming Interface*).

4.1.1.2 Penguatan Kapasitas Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Pasuruan

Aksi:

1. Bimbingan teknis penyusunan standar data dan metadata bagi ASN perangkat daerah.

Pelaksanaan aksi ini didasari oleh kendala bahwa data yang dipublikasikan oleh perangkat daerah seringkali tidak seragam, kurang akurat, dan minim informasi pelengkap (metadata), menyulitkan proses integrasi. Dengan demikian, tujuan aksi ini adalah menyeragamkan format, definisi, dan kualitas data sektoral Kabupaten Pasuruan melalui penerapan standar data dan metadata yang konsisten. Pelaksanaannya berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) yang mengajarkan teknik penyusunan kamus data, penentuan variabel, dan pengisian metadata sesuai standar yang ditetapkan oleh Wali Data Kabupaten Pasuruan dan mengacu pada standar nasional.

2. Pelaksanaan Bootcamp teknis (statistik, data management, SPBE, interoperabilitas, dan data governance).

Aksi ini didasarkan pada adanya kesenjangan pemahaman teknis yang mendalam di antara Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait implementasi teknologi dan tata kelola data modern, khususnya prinsip interoperabilitas dan *data governance*. Tujuan strategis yang hendak dicapai adalah memberikan pemahaman substantif dan keahlian praktis yang intensif serta menyeluruh dalam aspek teknis dan tata kelola Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi aksi tersebut berupa penyelenggaraan program *bootcamp* intensif selama periode yang ditentukan, yang melibatkan instruktur ahli dan menekankan pada praktik langsung (*hands-on*) serta analisis studi kasus. Secara

spesifik, peserta akan melaksanakan praktik pengolahan data menggunakan instrumen analitik tertentu guna menghasilkan indikator kinerja, simulasi pertukaran data antar-sistem melalui *Application Programming Interface* (API), serta penyusunan dokumen kebijakan tata kelola data di level Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

3. Peningkatan kapasitas ASN melalui Program Training of Trainers (ToT) untuk membentuk Agen Perubahan (Agent of Change) SDI.

Aksi ini merupakan aksi penting karena perangkat daerah seringkali menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi data secara spesifik yang dibutuhkan untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), termasuk perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebutuhan data yang akan diproduksi terencana dengan baik serta selaras dengan keperluan fundamental Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mekanisme pelaksanaan aksi ini melibatkan Tim Wali Data atau Wali Data Pendukung yang memberikan pendampingan secara langsung kepada perangkat daerah dalam menganalisis kebutuhan data, menyusun daftar data prioritas, dan membuat matriks ketersediaan data. Sebagai ilustrasi operasional, tim pendamping akan memandu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan Analisis Kesenjangan Data (*Data Gap Analysis*) melalui perbandingan antara data yang tersedia saat ini dengan data yang disyaratkan untuk mencapai target program, sehingga dihasilkan daftar kebutuhan data yang tervalidasi.

4.1.1.3 Penyelenggaraan Bimtek Metadata Kabupaten Pasuruan

Aksi:

1. Pelatihan Penyusunan Metadata Statistik dan Geospasial Berbasis Standar Nasional, dilengkapi Praktik Teknis

Aksi ini didasarkan pada kendala disparitas dan ketidaklengkapan metadata statistik dan geospasial yang diproduksi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga menyulitkan proses penemuan (*discovery*) dan interoperabilitas data.

Tujuan utama yang akan diimplementasikan adalah meningkatkan kapabilitas teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyusun, memvalidasi, dan memperbarui metadata data sektoral secara komprehensif, sesuai dengan standar nasional yang berlaku (misalnya BPS untuk statistik dan BIG/JIGN untuk geospasial). Mekanisme pelaksanaan aksi ini mencakup penyelenggaraan pelatihan intensif yang mengintegrasikan aspek konseptual dan praktik teknis penyusunan metadata. Secara spesifik, peserta akan menerima materi mengenai konsep metadata statistik (seperti variabel, definisi, dan *time series*) serta praktik penggunaan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) seperti QGIS atau ArcGIS untuk menginput metadata geospasial secara langsung ke dalam *layer* peta digital, sehingga dihasilkan metadata yang akurat dan terstandarisasi.

2. Pembentukan kelompok kerja kecil (mini task force) untuk metadata sektoral di setiap OPD.

Aksi ini menjadi penting dikarenakan proses penyusunan dan pemutakhiran metadata seringkali tidak terpusat pada satu individu dan membutuhkan koordinasi lintas-fungsi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan strategis yang diupayakan adalah menginternalisasi tanggung jawab pengelolaan metadata secara kolektif di level OPD serta memastikan konsistensi dan akurasi informasi data sektoral yang dihasilkan. Mekanisme pelaksanaan aksi ini mencakup penerbitan Surat Keputusan oleh Kepala OPD untuk membentuk *mini task force* metadata sektoral yang beranggotakan perwakilan dari unit perencanaan, pengumpulan data, dan teknologi informasi. Sebagai contoh, *mini task force* tersebut akan secara rutin menyelenggarakan *workshop* internal guna memverifikasi standar data dan metadata sebelum dipublikasikan, sehingga dihasilkan dokumen metadata yang terstandarisasi dan *up-to-date* pada portal SDI.

3. Workshop Verifikasi dan Harmonisasi Struktur Metadata Lintas Perangkat Daerah
- Aksi ini diselenggarakan karena adanya variasi implementasi pasca-pelatihan, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakseragaman struktur dan format metadata di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbeda. Tujuan utamanya adalah memverifikasi konsistensi *template* metadata yang telah disusun

serta mencapai kesepakatan kolektif mengenai standar dan format final metadata untuk seluruh data sektoral prioritas Kabupaten Pasuruan. Mekanisme pelaksanaan aksi ini melibatkan penyelenggaraan *workshop* terstruktur yang menghadirkan perwakilan *mini task force* metadata dari setiap OPD dan Tim Wali Data sebagai fasilitator. Secara spesifik, para peserta akan bersama-sama melakukan *review* silang (*peer review*) terhadap draf metadata yang telah diisi, kemudian menyepakati definisi variabel kunci (misalnya, variabel "status kepemilikan" atau "klasifikasi lahan") untuk distandarisasi secara tunggal, sehingga dihasilkan Kamus Data dan Metadata yang harmonis dan bersifat final untuk adopsi seluruh perangkat daerah.

4.1.1.4 Keikutsertaan dalam Bimtek yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat Aksi:

1. Menghadiri undangan Bimtek dan *workshop* yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait SDI.

Aksi ini diselenggarakan karena pentingnya perolehan informasi kebijakan dan pengetahuan teknis terkini secara langsung dari sumber otoritatif di tingkat pusat. Tujuan utamanya adalah memastikan Tim Wali Data dan Wali Data Pendukung mendapatkan pemahaman yang valid dan *up-to-date* mengenai regulasi, standar, dan prosedur implementasi SDI. Mekanisme pelaksanaan aksi ini melibatkan identifikasi dan penugasan ASN yang relevan untuk secara aktif menghadiri setiap undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan *workshop* yang dikirimkan oleh Kementerian/Lembaga terkait SDI, seperti Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebagai contoh, kehadiran Tim Wali Data pada sesi Bimtek BPS dapat fokus pada pembaruan klasifikasi statistik dan metodologi survei sektoral, sehingga kualitas data Kabupaten Pasuruan selaras dengan standar nasional.

2. Partisipasi aktif dalam forum koordinasi nasional Satu Data Indonesia.

Aksi ini diinisiasi karena perlunya membangun jejaring kerja profesional serta memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam konteks SDI antar-daerah. Tujuan utamanya adalah meningkatkan peran aktif Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam ekosistem SDI nasional serta memberikan kontribusi dan masukan konstruktif terhadap pengembangan kebijakan SDI di tingkat pusat.

Mekanisme pelaksanaan aksi ini mencakup penunjukan perwakilan ASN inti untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap agenda rapat, seminar, atau konferensi yang diadakan oleh Forum Koordinasi Nasional SDI. Sebagai contoh, partisipasi aktif tersebut berupa penyampaian studi kasus keberhasilan implementasi SDI di daerah serta diskusi teknis mengenai solusi interoperabilitas yang telah dikembangkan di Kabupaten Pasuruan, sehingga memperkaya khazanah pengetahuan nasional.

4.1.2 Program Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur Teknologi Informasi untuk SDI

4.1.2.1 Integrasi Portal SDI Kabupaten Pasuruan dengan Aplikasi Lain

Aksi :

1. Melakukan pemetaan aplikasi perangkat daerah yang siap diintegrasikan dengan Portal SDI dengan *prioritization matrix* untuk menentukan aplikasi mana yang paling siap dan mendesak diintegrasikan.

Aksi ini krusial karena ketersediaan banyak aplikasi di Perangkat Daerah (PD) tanpa *road map* integrasi yang jelas dapat menghambat efisiensi pertukaran data. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi secara sistematis aplikasi mana saja yang secara teknis *eligible* dan secara fungsional mendesak untuk segera diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia (SDI). Mekanisme pelaksanaan aksi ini melibatkan tim teknis untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh aplikasi data yang dimiliki PD, kemudian menyusun *prioritization matrix*. Sebagai contoh, matriks tersebut akan mempertimbangkan kriteria seperti kesiapan teknis API (*Application Programming Interface*), dampak data terhadap indikator RPJMD, dan volume permintaan data, sehingga dihasilkan *roadmap* integrasi yang efektif dan efisien.

2. Penyusunan API Documentation (Swagger/Postman) agar OPD punya panduan teknis yang lebih jelas.

Aksi ini diselenggarakan karena kurangnya panduan teknis yang standar seringkali menyebabkan kesulitan bagi pengembang aplikasi di OPD untuk melakukan koneksi data secara akurat dan konsisten ke Portal SDI. Tujuan utamanya adalah menyediakan dokumentasi teknis yang komprehensif dan mudah diimplementasikan, sehingga memfasilitasi proses interoperabilitas data

antar-sistem. Mekanisme pelaksanaan aksi ini mencakup tim pengembang inti SDI untuk menyusun *API Documentation* menggunakan *tools* standar industri seperti Swagger atau Postman. Sebagai contoh, dokumentasi teknis tersebut akan memuat spesifikasi *endpoint*, format *request* dan *response* data (misalnya JSON), *authentication methods*, sehingga OPD dapat melakukan koneksi mandiri sesuai panduan yang disajikan.

3. Implementasi automated scheduled sync (sinkronisasi terjadwal).

Aksi ini diinisiasi karena proses pemutakhiran data secara manual rentan terhadap *human error* dan menyebabkan keterlambatan ketersediaan data terbaru di Portal SDI. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa data yang tersedia di Portal SDI selalu real-time atau mendekati real-time, sehingga kualitas dan ketepatan waktu data yang digunakan untuk perencanaan daerah dapat dijamin. Mekanisme pelaksanaan aksi ini melibatkan tim teknis SDI untuk mengembangkan dan mengimplementasikan mekanisme sinkronisasi data secara otomatis dan terjadwal (*automated scheduled sync*) antara sistem sumber data di PD dengan Portal SDI. Sebagai contoh, *sync* data status kehadiran pegawai atau data *realisasi anggaran* akan diatur untuk berjalan secara otomatis setiap hari pada pukul tertentu (misalnya pukul 00:00), sehingga data terbaru dapat diakses tanpa intervensi manual.

4.1.2.2 Sistem Tata Kelola Data dalam Portal SDI

Aksi :

1. Tinjauan Ulang dan Perbaikan SOP Pengelolaan Portal SDI
Aksi ini dilakukan untuk mengatasi ketidakefisienan dan inkonsistensi dalam pengelolaan Portal SDI dengan merevisi SOP yang sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Prosesnya meliputi evaluasi menyeluruh terhadap alur kerja, pembaruan mekanisme persetujuan, dan penyesuaian standar konten, seperti memperjelas tahapan verifikasi data spasial dari OPD sebelum dipublikasi, guna menjamin keandalan informasi yang disajikan kepada publik.

4.1.3 Program Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola Penyelenggaraan SDI

4.1.3.1 Penyempurnaan Pedoman Prinsip SDI pada Penyelenggara Statistik

Aksi :

1. Penyempurnaan Pedoman dan Standarisasi Proses Statistik Sektoral

Implementasi penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah menghadapi hambatan substantif berupa disparitas pedoman teknis, ketidaksesuaian proses bisnis dengan regulasi terkini, dan rendahnya kapasitas SDM dalam penerapan standar metadata. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan inkohereni metodologis, inkonsistensi kualitas data, dan kegagalan dalam memenuhi prinsip interoperabilitas data nasional. Secara spesifik, aksi ini bertujuan untuk: (1) melakukan harmonisasi framework regulasi statistik melalui reviu komprehensif terhadap pedoman kegiatan statistik sektoral; (2) menyelaraskan proses bisnis statistik dengan perkembangan kebijakan nasional; (3) memperkuat sistem penjaminan mutu data berbasis evaluasi kinerja sebelumnya; serta (4) meningkatkan kapasitas teknis OPD melalui internalisasi standar metadata mengacu BPS dan Kebijakan SDI Nasional. Outcome strategis yang diharapkan adalah terwujudnya tata kelola data statistik yang terstandarisasi, konsisten, dan berorientasi kualitas, sehingga mampu mendukung efektivitas perencanaan pembangunan berbasis evidence serta pemenuhan prinsip keterbandingan data dalam kerangka SDI nasional.

4.1.4 Program Pengelolaan Data Prioritas dan Statistik Sektoral

4.1.4.1 Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas

Aksi :

1 Membuat Pertemuan untuk Penyusunan dan Pembaruan Daftar Data Prioritas Sektoral

Proses penyusunan daftar data prioritas di pemerintah daerah selama ini menghadapi hambatan struktural berupa belum adanya mekanisme koordinasi yang sistematis antar-OPD, ketidaksesuaian antara kebutuhan data dengan agenda pembangunan daerah, serta terbatasnya sosialisasi daftar data prioritas yang mengakibatkan tumpang-tindih dalam produksi data. Aksi terpadu ini bertujuan untuk: (1) menyelenggarakan forum koordinasi lintas OPD guna mengevaluasi relevansi daftar data prioritas eksisting; (2) melakukan pembaruan komprehensif daftar data prioritas berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah dan kesenjangan data; serta (3) memastikan diseminasi daftar data terbaru kepada

seluruh produsen dan wali data secara efektif. Outcome yang diharapkan adalah terciptanya sistem perencanaan data yang terintegrasi, responsif terhadap kebutuhan pembangunan, dan mampu meminimalisir duplikasi sumber daya melalui koordinasi yang berkelanjutan antar-pemangku kepentingan data.

4.1.4.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Aksi :

1. Pengembangan Platform Pengumpulan Data Berbasis Web
Aksi ini mengatasi masalah inkonsistensi format dan lama waktu pengumpulan data dengan membuat platform terpusat berbasis web yang menyediakan template standar sesuai ketentuan SDI. Platform ini dilengkapi validasi otomatis untuk memastikan kelengkapan, konsistensi format, dan kesesuaian koordinat sejak tahap input, seperti sistem yang secara real-time memverifikasi apakah format koordinat pada data batas administrasi sudah sesuai standar sebelum disimpan.
2. Pembuatan Basis Data Geospasial Terstandar Lintas OPD
Aksi ini menjawab tantangan tumpang tindih dan ketidakterintegrasian data geospasial dengan membangun basis data terpusat yang mengadopsi standar nasional (JIGN). Basis data ini memungkinkan integrasi data tematik dari berbagai OPD (contohnya data jaringan irigasi dari Dinas PUPR dan lahan sawah dari Dinas Pertanian) dalam satu referensi spasial yang konsisten, menghilangkan duplikasi dan menjamin interoperabilitas data.

4.1.5 Program Penjaminan Kualitas dan Verifikasi Data Pemerintah Daerah

4.1.5.1 Desk keterisian, updating, verifikasi dan validasi

Aksi:

1. Audit Teknis dan Pendampingan Korektif untuk Penjaminan Kualitas Data
Aksi ini dirancang sebagai solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah ketidakserasian antara data dengan metadata sekaligus menangani akar permasalahan kualitas data di tingkat OPD. Melalui mekanisme audit teknis berkala, tim verifikasi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesesuaian format, definisi variabel, dan konsistensi temporal-spasial pada dataset, seperti memverifikasi apakah data "Jumlah Penduduk Miskin" sudah sesuai dengan metodologi dan periode yang tercantum dalam metadata. Temuan dari audit ini

kemudian menjadi dasar pelaksanaan pendampingan korektif yang terfokus, dimana tim ahli memberikan bimbingan teknis langsung kepada OPD untuk melakukan koreksi kesalahan sistematis, menyusun prosedur tetap, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan data, contohnya dengan membantu OPD Perumahan merevisi data backlog permukiman kumuh berdasarkan kriteria verifikasi terbaru. Dengan integrasi ini, proses penjaminan kualitas data tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi langsung diikuti dengan solusi perbaikan yang membangun kemandirian OPD dalam menghasilkan data yang akurat dan andal.

4.1.5.2 Rekomendasi Kegiatan Statistik

Aksi :

1. Penyusunan Modul E-Learning Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Statistik

Aksi ini bertujuan mempermudah dan memstandarkan proses pengajuan rekomendasi statistik bagi semua OPD dengan mengatasi hambatan kebingungan terhadap prosedur yang berbelit. Contoh nyatanya adalah sebuah modul digital interaktif yang diunggah di LMS, berisi simulasi langkah demi langkah—mulai dari pengisian formulir online, upload dokumen persyaratan, hingga tracking status pengajuan—sehingga OPD dapat belajar mandiri kapan saja tanpa harus menunggu pelatihan tatap muka.

2. Pembuatan Video Tutorial & Template Digital

Aksi ini dirancang untuk mempercepat pemahaman OPD terhadap alur pengajuan melalui panduan visual yang mudah dicerna, mengatasi kendala penjelasan tekstual yang sering disalahartikan. Sebagai contoh, video animasi singkat dapat menunjukkan cara mengisi formulir pengajuan yang kompleks menjadi sederhana, sementara template digital (seperti file Excel yang telah diformat) disediakan untuk membantu OPD menyusun kerangka sampling dan metodologi secara konsisten dan benar.

3. Membuat Grup Koordinasi Terpadu (BPS–OPD–Wali Data)

Inisiatif ini menciptakan satu kanal komunikasi resmi untuk memutus hambatan koordinasi yang tersebar dan lambat antara BPS, OPD pengaju, dan Wali Data. Contoh penerapannya adalah dengan membentuk grup chat khusus di platform Microsoft Teams atau Telegram yang di dalamnya dapat langsung

dibahas pertanyaan teknis, klarifikasi data, dan persetujuan rekomendasi secara real-time, menggantikan model komunikasi via email yang memakan waktu lebih lama.

4. Pembuatan QR Code Verifikasi Dokumen

Aksi ini menjawab tantangan keaslian dan keabsahan dokumen rekomendasi statistik yang kerap diragukan. Bukti konkretnya, setiap rekomendasi yang diterbitkan akan dilengkapi dengan kode QR yang unik; ketika di-scan menggunakan ponsel, kode tersebut akan mengarahkan pengguna ke halaman resmi BPS untuk memverifikasi keautentikan dokumen tersebut, sekaligus mencegah pemalsuan dan memastikan integritas data yang digunakan.

4.1.5.3 Penyusunan Metadata Statistik

Aksi :

1. Melakukan upgrade pelatihan teknis penyusunan metadata statistik sesuai format SDI.

Aksi ini dirancang untuk mengatasi hambatan pemahaman dan penerapan format metadata yang seragam dengan mengubah pelatihan dari sekadar teori menjadi pengalaman praktis yang berdampak. Inovasinya terletak pada pengemasan pelatihan sebagai "bootcamp sertifikasi" yang dilengkapi dengan AI-powered metadata assistant, sebuah tool yang mampu memindai draf metadata yang diinput peserta dan secara otomatis memberikan siksi untuk perbaikan, kelengkapan field, dan konsistensi kosakata terkendali, sehingga peserta tidak hanya paham teori tetapi juga langsung mampu menghasilkan metadata yang berkualitas dan siap pakai.

2. Pembuatan Sistem Tiket Perbaikan Metadata seperti Spreadsheet tracking, atau Modul sederhana di Portal SDI.

Aksi ini bertujuan menangani masalah perbaikan metadata yang lambat dan tidak terpantau dengan mengubah mekanisme *reporting* yang semrawut menjadi proses yang terstruktur dan akuntabel. Inovasinya adalah dengan menerapkan Metadata Quality Control Dashboard yang terintegrasi di Portal SDI, di mana metadata yang error atau tidak lengkap akan otomatis menghasilkan tiket kerja, terkategori berdasarkan tingkat keparahan (kritis, tinggi, sedang), dan dapat ditrack pergerakannya secara *real-time* seperti pada *project management*

board, memastikan tidak ada lagi laporan yang tertunda dan status perbaikan transparan bagi semua pihak.

4.1.6 Program Diseminasi dan Aksesibilitas Data Kabupaten Pasuruan

4.1.6.1 Melaksanakan Publikasi Data

Aksi :

1. Implementasi Sistem Kalender Rilis Data Terintegrasi

Aksi ini dirumuskan untuk mengatasi kondisi awal dimana mekanisme publikasi data bersifat *ad-hoc* dan tidak terkoordinasi, sehingga menimbulkan asimetri informasi dan mengurangi nilai utilitas data bagi pemangku kepentingan. Secara akademis, pendekatan ini mengadopsi prinsip *scheduled information disclosure* untuk membangun ekspektasi dan disiplin dalam siklus hidup data. Tujuannya adalah menciptakan sebuah rezim publikasi yang transparan dan dapat diprediksi, dimana melalui rapat koordinasi, seluruh OPD menyepakati jadwal rilis dalam kalender terintegrasi di Portal SDI. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya *data reliability* dan terbentuknya alur informasi yang sistematis, sehingga data dapat diakses pada waktu yang tepat untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi yang *evidence-based*.

2. Standardisasi Template Infografis dengan QR Code

Aksi ini berangkat dari permasalahan disparitas visualisasi data dan rendahnya keterpautan (*linkage*) antara produk statistik ringkas dengan dataset lengkap, yang dalam perspektif ilmu informasi dapat menghambat *deep diving* analisis. Guna meningkatkan aksesibilitas dan konsistensi diseminasi, dirancanglah template infografis standar yang mengacu pada prinsip *visual encoding* dan *human-computer interaction*. Inovasi integrasi QR Code berfungsi sebagai jembatan digital (*seamless gateway*) yang mengonversi minat dari tingkat informasi ringkas (infografis) langsung ke tingkat data mentah atau terstruktur di portal SDI. Tujuannya adalah meminimalisir *information loss*, mempercepat akses ke data primer, dan pada akhirnya meningkatkan utilitas serta transparansi data yang dipublikasikan oleh seluruh OPD.

4.1.6.2 Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Data

Aksi :

1. Pembuatan Microlearning/Video Pendek Edukasi tentang SDI untuk Media Sosial
Aksi ini bertujuan mengatasi rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat serta OPD mengenai SDI dengan menghadirkan konten informatif yang mudah diakses. Hambatan utamanya adalah materi sosialisasi konvensional dinilai kurang menarik dan sulit menjangkau audiens digital. Melalui pembuatan video pendek (1-3 menit) yang kreatif dan informatif, seperti tutorial mengunduh data atau penjelasan manfaat data spasial, diharapkan publik dapat lebih memahami peran SDI dalam mendukung pelayanan publik. Contohnya, video "5 Manfaat Data Geospasial untuk Petani" akan disebarluaskan melalui Instagram dan YouTube untuk meningkatkan engagement dan pengetahuan praktis.
2. Melaksanakan Workshop Teknis Pemahaman Pedoman Hasil Revisi kepada OPD
Aksi ini dirancang untuk mengatasi ketidaksinkronan implementasi kebijakan akibat kurangnya pemahaman OPD terhadap pedoman SDI yang telah direvisi. Tujuannya adalah memastikan seluruh OPD memahami dan menerapkan standar terbaru secara konsisten, sehingga kualitas dan integrasi data terjaga. Kegiatannya berupa workshop interaktif yang membahas perubahan pedoman, studi kasus, dan simulasi penerapan aturan baru. Misalnya, workshop tentang "Penerapan Standar Metadata JIGN Versi Terbaru" akan membantu OPD menyusun metadata secara benar dan seragam.

4.1.7 Program Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja SDI

4.1.7.1 Monitoring dan Evaluasi

Aksi:

1. Pembuatan dashboard publik Monev SDI untuk transparansi
Aksi ini bertujuan untuk mengatasi hambatan kurangnya transparansi dan akses informasi bagi publik mengenai kinerja Sistem Informasi dan Data (SDI). Dengan membuat dashboard publik Monev (Monitoring dan Evaluasi), seluruh progres, capaian, dan bahkan tantangan dalam implementasi SDI dapat diakses secara terbuka dan real-time oleh masyarakat, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Dashboard ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas yang memvisualisasikan data kinerja kunci, sehingga tidak hanya memudahkan internal dalam memantau perkembangan, tetapi juga membangun kepercayaan publik

melalui keterbukaan informasi. Pembuatan Dashboard Publik Monev SDI bertujuan menciptakan transparansi dengan mengatasi hambatan minimnya akses informasi bagi masyarakat mengenai perkembangan SDI. Bukti nyata dari aksi ini adalah sebuah website dashboard interaktif yang dapat diakses online oleh siapa saja, yang di dalamnya menampilkan grafik progress real-time, peta ketersediaan data, dan angka tingkat utilisasi layanan SDI. Dengan adanya visualisasi data yang langsung terbuka ini, akuntabilitas kinerja institusi dapat terwujud dan kepercayaan publik akan meningkat.

2. Melaksanakan Meeting evaluasi dilakukan secara terjadwal

Pelaksanaan Meeting Evaluasi secara terjadwal bertujuan untuk mengatasi hambatan evaluasi yang selama ini bersifat insidental dan tidak konsisten, sehingga seringkali tidak menghasilkan tindak lanjut yang jelas. Bukti konkrit dari aksi ini adalah jadwal tetap rapat (misalnya triwulanan) yang sudah disepakati dan didokumentasikan dalam kalender resmi, serta notulen rapat yang secara sistematis mencantumkan poin evaluasi, keputusan, dan daftar tugas beserta penanggung jawabnya. Dengan mekanisme yang rutin dan terstruktur ini, proses perbaikan kinerja SDI dapat berjalan secara berkelanjutan dan terukur.

4.1.8 Program Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan SDI

4.1.8.1 Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan SDI

Aksi :

1. Dibentuk Forum Koordinasi Teknis SDI bulanan/tri-wulan

Pembentukan Forum Koordinasi Teknis SDI secara berkala (bulanan/tri-wulan) ini bertujuan untuk mengatasi hambatan koordinasi yang selama ini sering bersifat reaktif dan tidak terstruktur, seperti miskomunikasi, lambatnya penyelesaian masalah, dan kurangnya sinergi antar unit. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat bertemu secara rutin untuk menyelaraskan pemahaman, melaporkan perkembangan, serta membahas dan memecahkan kendala teknis secara kolaboratif. Dengan demikian, forum ini berperan sebagai wadah strategis untuk memastikan implementasi SDI berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Pembentukan coaching clinic untuk OPD yang masih rendah kualitas datanya

Pembentukan Coaching Clinic ini bertujuan secara langsung meningkatkan kualitas data dari OPD yang masih mengalami kendala, dengan mengatasi hambatan seperti kurangnya kapasitas SDM dan tidak adanya pendampingan teknis yang intensif. Melalui metode ini, tenaga ahli akan memberikan bimbingan dan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap OPD, berbeda dengan pelatihan umum yang bersifat teoritis. Fokus kegiatannya adalah pemecahan masalah secara langsung (*hands-on*) terhadap kendala nyata dalam pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan data. Dengan demikian, coaching clinic berperan sebagai pendorong percepatan peningkatan mutu data untuk mendukung kesuksesan implementasi SDI secara menyeluruh.

3. Pelatihan memanfaatkan learning management system (LMS) untuk modul digital
Pelatihan memanfaatkan Learning Management System (LMS) ini bertujuan untuk mengatasi hambatan akses dan konsistensi pelatihan dengan menyediakan modul digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh seluruh pegawai. Melalui LMS, materi pelatihan yang sebelumnya mungkin terbatas pada sesi tatap muka dapat distandardisasi dan didistribusikan secara merata kepada semua OPD. Kegiatannya berfokus pada pelatihan penggunaan platform LMS itu sendiri serta pengembangan konten modul digital yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan kerja. Dengan demikian, inisiatif ini menciptakan sebuah ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan, efisien, dan terukur untuk terus meningkatkan kompetensi SDM dalam mendukung SDI.

Berikut tabel yang berisi Program, Aksi, output, dan Outcome hasil yang diharapkan:

1. Program Peningkatan Kapasitas SDM			
1.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Pasuruan			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Pelatihan Kegiatan Statistik Sektoral bagi ASN pengelola data.	Output	Outcome
		Pelaksanaan Pelatihan: Terlaksananya pelatihan statistik sektoral dengan	Peningkatan Kompetensi: Meningkatnya kapasitas teknis ASN peserta

		jumlah peserta ASN dari OPD terkait sesuai target	pelatihan dalam penerapan metode statistik sektoral
		Penyusunan Modul: Tersusunnya modul pelatihan statistik sektoral sesuai standar kompetensi BNSP	Standarisasi Proses: Teradopsinya modul pelatihan sebagai bahan referensi standar di OPD
		Sertifikasi Kompetensi: Terbitnya sertifikat kompetensi bagi peserta yang lulus uji	Peningkatan Sertifikasi: Meningkatnya jumlah ASN tersertifikasi di bidang statistik sektoral
		Evaluasi Program: Tersedianya laporan evaluasi pelatihan dan rekomendasi tindak lanjut	Perbaikan Berkelanjutan: Terimplementasinya rekomendasi perbaikan proses statistik di OPD
		Pengukuran Kemajuan: Terlaksananya pre-test dan post-test dengan peningkatan skor rata-rata	Peningkatan Pemahaman: Meningkatnya pemahaman konseptual dan aplikasi teknik statistik pada pekerjaan sehari-hari
		Pembelajaran Praktis: Terselenggaranya sesi praktikum dan studi kasus lapangan	Peningkatan Kapabilitas: Meningkatnya kemampuan aplikasi teknik statistik dalam pengolahan data sektoral riil

		Identifikasi Masalah: Teridentifikasinya permasalahan statistik di masing-masing OPD	Penyelesaian Masalah: terselesaikannya masalah pengelolaan data melalui pendampingan teknis
		Jejaring Profesional: Terbentuknya jejaring kerja ASN pengelola data statistik sektoral	Peningkatan Kolaborasi: Meningkatnya kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar-OPD dalam pengelolaan data
		Penyusunan Pedoman: Tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan kegiatan statistik sektoral	Konsistensi Metodologi: Tercapainya keseragaman metodologi dan standar kualitas data antar OPD
		Evaluasi Berkelanjutan: Terlaksananya evaluasi pasca pelatihan secara berkala	Keberlanjutan Program: Terpantaunya dampak pelatihan terhadap kinerja pengelolaan data statistik
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM SDI yang Terstruktur	Pelaksanaan Pelatihan Berjenjang: Terselenggaranya pelatihan dasar, menengah, dan lanjutan untuk [jumlah] peserta ASN	Peningkatan Kompetensi Teknis: Meningkatnya kemampuan teknis SDM dalam pengelolaan data geospasial dan penyusunan metadata
		Pengembangan Kurikulum: Tersusunnya modul pelatihan berbasis kompetensi BIG/JIGN	Standardisasi Proses: Terimplementasinya standar nasional dalam pengelolaan data geospasial di OPD

		Sistem Pendampingan: Terbentuknya mekanisme konsultasi teknis pasca-pelatihan	Keberlanjutan Program: Tersedianya dukungan teknis berkelanjutan bagi alumni pelatihan
		Digital Quality Control: Terimplementasinya Metadata Quality Control Dashboard	Peningkatan Kualitas Data: Meningkatnya akurasi dan konsistensi metadata secara signifikan
		Sertifikasi Kompetensi: Terbitnya sertifikat bagi peserta yang lulus uji kompetensi	Pengakuan Kompetensi: Diakuinya kompetensi SDM dalam pengelolaan data geospasial
3	Rekrutmen SDM Ahli Bidang Teknologi Digital/Statistisi/Data Science	Proses Rekrutmen: Terseleksi nya [jumlah] SDM ahli melalui proses seleksi yang kompetitif	Penguatan Tim SDI: Terisinya posisi-posisi kunci dalam Tim SDI dengan tenaga ahli yang kompeten
		Penempatan Tenaga Ahli: Terintegrasinya SDM ahli dalam struktur Tim SDI	Peningkatan Kapasitas Teknis: Meningkatnya kemampuan Tim SDI dalam analisis data dan pengembangan sistem
		Penyusunan Job Description: Tersusun nya tugas dan tanggung jawab jelas untuk setiap posisi	Efektivitas Kerja: Tercapainya target kerja yang jelas dan terukur untuk setiap SDM ahli
		Pengembangan Sistem: Terbangunnya	Interoperabilitas Data: Meningkatnya

		pipeline data dan sistem integrasi berbasis API	kemampuan integrasi data antar sistem dan OPD
		Dokumentasi Keahlian: Tersedianya portfolio keahlian dan capaian teknis SDM ahli	Akuntabilitas Kinerja: Terpantaunya kontribusi dan dampak kerja SDM ahli secara transparan
		Program Knowledge Transfer: Terselenggaranya program alih pengetahuan dari SDM ahli ke ASN	Kapasitas Internal: Meningkatnya kompetensi teknis ASN lokal melalui pembelajaran langsung

1.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Pasuruan

No	Aksi	Output	Outcome
1	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Data dan Metadata	Modul Bimtek: Tersusunnya modul bimbingan teknis standar data dan metadata	Standardisasi Data: Terselenggaranya proses harmonisasi definisi, format, dan struktur data antar OPD
		Peserta Terlatih: Terlatihnya sejumlah ASN perangkat daerah sebagai administrator data	Konsistensi Metadata: Meningkatnya kualitas dan kelengkapan metadata sesuai standar nasional
		Kamus Data: Terbentuknya kamus data terpadu Kabupaten Pasuruan	Interoperabilitas: Meningkatnya kemampuan integrasi data antar sistem dan OPD

		Dokumen Standar: Tersusunnya dokumen standar data dan metadata yang disepakati	Kualitas Data: Meningkatnya akurasi, konsistensi, dan reliabilitas data sektoral
		Pedoman Operasional: Tersedianya pedoman teknis implementasi standar data	Kepatuhan Standar: Terimplementasinya standar data secara konsisten di seluruh OPD
2	Pelaksanaan Bootcamp Teknis	Kurikulum Bootcamp: Tersusunnya kurikulum bootcamp komprehensif	Peningkatan Kapasitas Teknis: Meningkatnya kompetensi teknis ASN dalam pengelolaan data modern
		Peserta Certified: Tersertifikasinya peserta bootcamp melalui uji kompetensi	Implementasi Praktis: Teraplikasinya pengetahuan teknis dalam pekerjaan sehari-hari
		Project Based Learning: terselesaikannya proyek praktikum dan studi kasus	Inovasi Layanan: Berkembangnya inovasi layanan berbasis data di OPD
		API Integration: Terimplementasinya simulasi pertukaran data melalui API	Interoperabilitas Sistem: Meningkatnya konektivitas dan pertukaran data antar sistem
		Dokumen Kebijakan: Tersusunnya draft	Tata Kelola Data: Terkuatnya framework tata kelola data di level OPD

		kebijakan tata kelola data OPD	
3	Program Training of Trainers (ToT) Agen Perubahan SDI	Agen Perubahan: Terbentuknya kelompok agen perubahan SDI di setiap OPD	Kapasitas Internal: Meningkatnya kemampuan OPD dalam mengelola kebutuhan data secara mandiri
		Analisis Kesenjangan: Tersusunnya dokumen analisis kesenjangan data per OPD	Perencanaan Data: Tersusunnya perencanaan data yang selaras dengan RPJMD dan Tupoksi OPD
		Daftar Prioritas: Teridentifikasinya daftar data prioritas setiap OPD	Efisiensi Resources: Tercapainya optimalisasi sumber daya dalam produksi data
		Matriks Ketersediaan: Tersusunnya matriks ketersediaan dan kebutuhan data	Penjaminan Ketersediaan: Terpenuhinya kebutuhan data strategis untuk perencanaan pembangunan
		Rencana Aksi: Tersusunnya rencana aksi pengelolaan data setiap OPD	Keberlanjutan: Terjaminnya sustainability pengelolaan data di tingkat OPD
1.3 Penyelenggaraan Bimtek Metadata Kabupaten Pasuruan			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Pelatihan Penyusunan Metadata Statistik dan Geospasial	Peserta Terlatih: Terlatihnya sejumlah ASN dari setiap OPD dalam penyusunan metadata	Peningkatan Kapasitas Teknis: Meningkatnya kemampuan ASN dalam menyusun metadata sesuai standar nasional

		Modul Pelatihan: Tersusunnya modul pelatihan metadata terintegrasi statistik dan geospasial	Standardisasi Kualitas: Tercapainya konsistensi kualitas metadata antar OPD
		Praktik Lapangan: Terselesaikannya praktik teknis input metadata menggunakan QGIS/ArcGIS	Aplikasi Langsung: Teraplikasinya pengetahuan teknis dalam pekerjaan sehari-hari di OPD
		Dokumen Metadata: Terhasilkannya draft metadata untuk data prioritas setiap OPD	Ketersediaan Metadata: Meningkatnya kelengkapan dan akurasi metadata di portal SDI
2	Pembentukan Kelompok Kerja Metadata Sektoral	Struktur Organisasi: Terbentuknya mini task force metadata di setiap OPD melalui SK resmi	Kelembagaan yang Kuat: Terinternalisasinya tanggung jawab pengelolaan metadata di tingkat OPD
		Rencana Kerja: Tersusunnya rencana kerja dan jadwal verifikasi metadata setiap OPD	Proses yang Berkelanjutan: Terjaminnya konsistensi pemutakhiran metadata secara berkala
		Workshop Internal: Terselenggaranya workshop verifikasi standar data di setiap OPD	Akurasi Data: Meningkatnya akurasi dan konsistensi informasi data sektoral
		Dokumen Standar: Tersedianya dokumen	Kepatuhan Standar: Terimplementasinya standar

		standar metadata yang disepakati setiap OPD	metadata secara merata di semua OPD
3	Workshop Verifikasi dan Harmonisasi Metadata Lintas OPD	Forum Koordinasi: Terselenggaranya workshop harmonisasi dengan perwakilan semua OPD	Harmonisasi Metadata: Tercapainya keseragaman struktur dan format metadata lintas OPD
		Kamus Data: Tersusunnya kamus data terpadu Kabupaten Pasuruan	Integrasi Data: Meningkatnya kemampuan integrasi dan pertukaran data antar OPD
		Dokumen Kesepakatan: Terbentuknya dokumen kesepakatan standar metadata final	Interoperabilitas: Meningkatnya kemudahan akses dan penggunaan data lintas sektor
		Verifikasi Kolektif: Tervalidasinya metadata data prioritas melalui review silang	Kualitas Terjamin: Terjaminnya kualitas metadata melalui proses verifikasi berlapis
1. 4. Keikutsertaan dalam Bimtek yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Keikutsertaan dalam Bimtek dan Workshop Pemerintah Pusat	Dokumen Partisipasi: Tersedianya surat tugas dan laporan keikutsertaan dalam setiap kegiatan Bimtek/workshop	Pemutakhiran Pengetahuan: Meningkatnya pemahaman Tim Wali Data terhadap regulasi, standar, dan prosedur SDI terkini

		Materi Terkini: Terkumpulnya materi dan dokumentasi Bimtek dari kementerian/lembaga terkait	Penyesuaian Standar: Terselaraskannya standar dan metodologi data Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan nasional
		Rekomendasi Implementasi: Tersusunnya rekomendasi tindak lanjut hasil Bimtek untuk diterapkan di daerah	Peningkatan Kualitas Data: Meningkatnya akurasi dan konsistensi data sesuai standar nasional
		Database Narasumber: Teridentifikasinya narasumber dan pakar nasional di bidang SDI	Jejaring Profesional: Terbangunnya jaringan kerja dengan pakar dan praktisi SDI tingkat nasional
2	Partisipasi Aktif dalam Forum Koordinasi Nasional Satu Data Indonesia	Laporan Partisipasi: Tersedianya laporan hasil partisipasi dalam setiap forum koordinasi nasional	Peningkatan Jejaring: Terbangunnya kolaborasi yang kuat dengan daerah lain dan kementerian/lembaga
		Kontribusi Aktif: Tersampaiakannya masukan dan best practices Kabupaten Pasuruan dalam forum nasional	Pengakuan Nasional: Meningkatnya reputasi dan kontribusi Kabupaten Pasuruan dalam pengembangan SDI nasional
		Dokumen Pembelajaran: Terdok	Adopsi Inovasi: Tereplikasinya

		umentasikan lesson learned dan inovasi dari daerah lain	praktik terbaik dan inovasi dari daerah lain di Kabupaten Pasuruan
		Policy Brief: Tersusunnya policy brief berdasarkan hasil forum untuk pengembangan kebijakan daerah	Pengembangan Kebijakan: Terintegrasinya rekomendasi nasional dalam kebijakan SDI daerah
2. Program Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur Teknologi Informasi untuk SDI			
2.1. Integrasi Portal SDI Kabupaten Pasuruan dengan Aplikasi Lain			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Pemetaan Aplikasi dengan Prioritization Matrix	Dokumen Pemetaan: Tersusunnya dokumen pemetaan aplikasi seluruh OPD	Roadmap Integrasi: Tersedianya panduan prioritas integrasi aplikasi berdasarkan kriteria objektif
		Prioritization Matrix: Teridentifikasinya aplikasi prioritas untuk integrasi menggunakan matriks penilaian	Efisiensi Sumber Daya: Tercapainya optimalisasi alokasi sumber daya untuk integrasi sistem
		Kriteria Seleksi: Tersusunnya kriteria teknis dan fungsional untuk penilaian kesiapan integrasi	Keputusan Strategis: Terbantunya pengambilan keputusan dalam perencanaan integrasi sistem

2	Penyusunan API Documentation	Dokumentasi API: Tersusunnya dokumentasi API lengkap menggunakan Swagger/Postman	Kemudahan Integrasi: Meningkatnya kemudahan bagi OPD dalam melakukan integrasi data
		Standar Teknis: Tersedianya standar teknis untuk request dan response data (JSON/XML)	Konsistensi Format: Tercapainya keseragaman format pertukaran data antar sistem
		Panduan Implementasi: Terbentuknya panduan step-by-step integrasi untuk pengembang OPD	Efisiensi Waktu: Berkurangnya waktu yang dibutuhkan OPD untuk melakukan integrasi sistem
		Testing Environment: Tersedianya environment testing untuk validasi integrasi	Kualitas Integrasi: Meningkatnya kualitas dan keandalan integrasi antar sistem
3	Implementasi Automated Scheduled Sync	Sistem Otomatis: Terimplementasinya mekanisme sinkronisasi data otomatis terjadwal	Ketersediaan Data Real-time: Meningkatnya ketersediaan data terbaru di Portal SDI
		Jadwal Sync: Tersusunnya jadwal sinkronisasi untuk berbagai jenis data prioritas	Ketepatan Waktu: Terjaminnya ketepatan waktu ketersediaan data untuk pengambilan keputusan
		Monitoring System: Terbangunnya sistem monitoring	Keandalan Sistem: Meningkatnya

		performa sinkronisasi data	keandalan sistem dalam menjaga konsistensi data
		Error Handling: Tersedianya mekanisme penanganan error saat sinkronisasi	Minimal Downtime: Berkurangnya gangguan dalam ketersediaan data di Portal SDI

2.2 Sistem Tata Kelola Data dalam Portal SDI

No	Aksi	Output	Outcome
1	Tinjauan Ulang dan Perbaikan SOP Pengelolaan Portal SDI	Dokumen SOP Terbaru: Tersusunnya dokumen SOP pengelolaan Portal SDI yang telah direvisi dan disahkan	Efisiensi Proses: Meningkatnya efisiensi dalam proses pengelolaan dan pemutakhiran data di Portal SDI
		Alur Kerja Terstruktur: Terdefinisiannya alur kerja yang jelas untuk verifikasi, validasi, dan publikasi data	Konsistensi Kualitas: Terjaganya konsistensi kualitas data yang dipublikasikan kepada masyarakat
		Mekanisme Persetujuan: Tersusunnya mekanisme persetujuan data yang transparan dan akuntabel	Akuntabilitas Pengelolaan: Meningkatnya akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan terkait publikasi data
		Standar Konten: Terumuskannya standar konten dan kualitas data yang harus	Keandalan Informasi: Meningkatnya keandalan informasi yang disajikan pada Portal SDI

		dipenuhi sebelum publikasi	
		Sosialisasi SOP: Terselenggaranya sosialisasi SOP kepada seluruh OPD dan pihak terkait	Kepatuhan Terhadap Prosedur: Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap prosedur pengelolaan data yang berlaku
3. Program Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola Penyelenggaraan SDI			
3.1 Penyempurnaan Pedoman Prinsip SDI pada Penyelenggara Statistik			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Penyempurnaan Pedoman dan Standarisasi Proses Statistik Sektoral Implementasi	Dokumen Pedoman Kegiatan Statistik Sektoral yang telah direviu komprehensif dan disahkan (minimal SK Kepala Daerah/OPD).	Terwujudnya Tata Kelola Statistik: Menghilangkan disparitas pedoman teknis yang menyebabkan inkohherensi metodologis.
		Peta Proses Bisnis Statistik Sektoral (SOP/Probis) yang telah diselaraskan dengan regulasi SDI dan perkembangan kebijakan nasional terkini.	Meningkatnya Konsistensi Data: Mengurangi inkonsistensi kualitas data antar-OPD yang disebabkan proses bisnis yang berbeda.
		Laporan Evaluasi Kinerja Statistik Sektoral yang terintegrasi dengan rekomendasi perbaikan untuk memperkuat	Penguatan <i>Evidence-Based Planning</i> : Mendukung efektivitas perencanaan pembangunan berbasis data yang teruji kualitasnya.

		sistem penjaminan mutu data.	
		Modul Internal Sosialisasi & <i>Training</i> penerapan standar metadata statistik mengacu pada BPS dan Kebijakan SDI Nasional.	Pemenuhan Prinsip Interoperabilitas: Memastikan data statistik sektoral memenuhi prinsip keterbandingan data dalam kerangka SDI Nasional.
4.Program Pengelolaan Data Prioritas dan Statistik Sektoral			
4.1 Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Pengembangan Platform Pengumpulan Data Berbasis Web	Platform Pengumpulan Data Berbasis Web yang telah diuji coba (UAT) dan siap digunakan oleh OPD.	Efisiensi Waktu Pengumpulan: Mengatasi masalah lama waktu pengumpulan data secara manual.
		Template Input Data Standar SDI terintegrasi dan dilengkapi Validasi Otomatis (<i>real-time</i>) untuk kelengkapan dan format.	Peningkatan Kualitas Data Dini: Memastikan konsistensi format dan kesesuaian koordinat sejak tahap input data.
2	Pembuatan Basis Data Geospasial Terstandar Lintas OPD	Basis Data Geospasial Terpusat yang telah dikonfigurasi dan mengadopsi standar nasional (JIGN).	nteroperabilitas Data: Menjamin data geospasial dapat dipertukarkan dan digunakan secara konsisten lintas OPD.

		Integrasi minimal 3 data tematik dari berbagai OPD (contoh: PUPR, Pertanian, Bappeda) dalam satu referensi spasial.	Konsistensi Spasial: Menghilangkan tumpang tindih data dan menjamin semua data berada dalam satu referensi spasial yang valid.
5. Program Penjaminan Kualitas dan Verifikasi Data Pemerintah Daerah			
5.1 Desk keterisian, updating, verifikasi dan validasi			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Audit Teknis dan Pendampingan Korektif untuk Penjaminan Kualitas Data	Dokumen Laporan Audit Teknis Berkala yang memuat hasil pemeriksaan menyeluruh kesesuaian format, definisi variabel, dan konsistensi data.	Peningkatan Kualitas Data: Mengatasi masalah ketidakserasian data dengan metadata dan akar permasalahan kualitas data di tingkat OPD.
		Daftar Temuan dan Rencana Aksi Korektif yang spesifik dan terperinci untuk perbaikan kesalahan sistematis di setiap dataset OPD.	Pembangunan Kemandirian OPD: Proses penjaminan kualitas data diikuti solusi perbaikan yang membangun kemandirian OPD dalam menghasilkan data akurat dan andal.
		Dokumentasi Pendampingan Korektif (termasuk <i>Prosedur Tetap</i> dan Bimbingan Teknis Langsung) yang diberikan kepada OPD.	Konsistensi Metodologi: Data yang dihasilkan menjadi lebih andal dan sesuai dengan metodologi serta periode yang tercantum dalam metadata.

5.2 Rekomendasi Kegiatan Statistik			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Penyusunan Modul E-Learning Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Statistik	Modul <i>E-Learning</i> Interaktif yang diunggah di LMS, berisi simulasi langkah demi langkah pengajuan rekomendasi statistik.	Kemudahan Prosedur: Mengatasi hambatan kebingungan prosedur dan mempermudah proses pengajuan rekomendasi statistik bagi OPD.
		Platform LMS/Repositori Digital yang siap diakses 24/7 untuk pembelajaran mandiri OPD.	Efisiensi Waktu Pelatihan: OPD dapat belajar mandiri kapan saja, mengurangi ketergantungan pada pelatihan tatap muka.
2	Pembuatan Video Tutorial & Template Digital	Video Tutorial Animasi Singkat yang menjelaskan secara visual alur pengajuan dan pengisian formulir yang kompleks.	Percepatan Pemahaman: Mengatasi kendala penjelasan tekstual dan mempercepat pemahaman OPD terhadap alur pengajuan.
		Template Digital (misalnya <i>file</i> Excel terformat) untuk penyusunan kerangka <i>sampling</i> dan metodologi statistik.	Konsistensi Metodologi: Membantu OPD menyusun kerangka <i>sampling</i> dan metodologi secara konsisten dan benar.
3	Membuat Grup Koordinasi Terpadu (BPS–OPD–Wali Data)	Grup Koordinasi Terpadu Resmi di platform komunikasi (misalnya Microsoft Teams/Telegram) yang melibatkan BPS, OPD, dan Wali Data.	Efektivitas Komunikasi: Menciptakan satu kanal komunikasi resmi, memutus hambatan koordinasi yang tersebar dan lambat.

		SOP Respon <i>Real-Time</i> untuk pertanyaan teknis, klarifikasi data, dan persetujuan rekomendasi melalui grup.	Akselerasi Proses: Menggantikan model komunikasi via <i>email</i> yang lambat dengan persetujuan <i>real-time</i> .
4	Pembuatan QR Code Verifikasi Dokumen	Sistem Pembuatan <i>QR Code</i> Unik yang terintegrasi dengan setiap dokumen rekomendasi statistik yang diterbitkan.	Jaminan Keabsahan: Menjawab tantangan keaslian dan keabsahan dokumen rekomendasi yang kerap diragukan.
		Halaman <i>Web</i> Verifikasi Resmi BPS yang dapat diakses saat <i>QR Code</i> di- <i>scan</i> .	Pencegahan Pemalsuan: Memastikan integritas data dan mencegah pemalsuan dokumen rekomendasi statistik.
5.3 Penyusunan Metadata Statistik			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Melakukan <i>Upgrade</i> Pelatihan Teknis Penyusunan Metadata Statistik sesuai format SDI.	Modul Pelatihan <i>Bootcamp Sertifikasi</i> yang menekankan pada praktik langsung penyusunan metadata statistik.	Peningkatan Kualitas Metadata: Memastikan peserta tidak hanya paham teori tetapi mampu menghasilkan metadata berkualitas dan siap pakai.
		Integrasi <i>AI-powered Metadata Assistant</i> (<i>tool</i> pendamping) yang mampu memindai, memberi diksi, dan memeriksa konsistensi kosakata terkendali.	Efisiensi Penerapan Standar: Mengatasi hambatan penerapan format yang seragam melalui bantuan alat yang otomatis dan cerdas.

2	Pembuatan Sistem Tiket Perbaikan Metadata seperti <i>Spreadsheet tracking</i> , atau Modul sederhana di Portal SDI.	Implementasi <i>Metadata Quality Control Dashboard</i> yang terintegrasi di Portal SDI, mampu menghasilkan tiket kerja otomatis untuk metadata yang <i>error</i> /tidak lengkap.	Akuntabilitas Perbaikan: Mengubah mekanisme <i>reporting</i> yang semrawut menjadi proses yang terstruktur dan akuntabel.
		Sistem <i>Tracking Real-time</i> tiket perbaikan metadata, terkategori berdasarkan tingkat keparahan (kritis, tinggi, sedang).	Peningkatan Kecepatan Koreksi: Memastikan tidak ada lagi laporan perbaikan metadata yang tertunda dan status perbaikan transparan bagi semua pihak.
6 Program Diseminasi dan Aksesibilitas Data Kabupaten Pasuruan			
6.1 Melaksanakan Publikasi Data			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Implementasi Sistem Kalender Rilis Data Terintegrasi	Dokumen Kesepakatan Jadwal Rilis Data yang disepakati melalui rapat koordinasi seluruh OPD, mengadopsi prinsip <i>scheduled information disclosure</i> .	Peningkatan Disiplin & <i>Reliability</i> : Menciptakan rezim publikasi yang transparan, dapat diprediksi, dan meningkatkan <i>data reliability</i> .
		Sistem Kalender Rilis Data Terintegrasi yang berfungsi penuh di Portal SDI, menampilkan jadwal	Pemanfaatan Data Tepat Waktu: Data dapat diakses pada waktu yang tepat untuk mendukung proses

		rilis data OPD secara sistematis.	perencanaan dan evaluasi yang <i>evidence-based</i> .
2	Standardisasi <i>Template</i> Infografis dengan QR Code	Template Infografis Standar yang telah disahkan, mengacu pada prinsip <i>visual encoding</i> dan <i>human-computer interaction</i> .	Peningkatan Utilitas & Aksesibilitas: Meminimalisir <i>information loss</i> dan meningkatkan konsistensi serta transparansi data yang dipublikasikan.
		Sistem Pembuatan dan Penempatan <i>QR Code</i> pada infografis yang berfungsi sebagai <i>seamless gateway</i> ke dataset lengkap di Portal SDI.	<i>Deep Diving</i> Analisis: Mempercepat akses pengguna dari tingkat informasi ringkas ke data primer, mendukung analisis yang lebih mendalam.
6.2 Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Data			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Pembuatan <i>Microlearning</i> /Vid eo Pendek Edukasi tentang SDI untuk Media Sosial	Minimal X Video <i>Microlearning</i> (berdurasi 1–3 menit) yang kreatif dan informatif, fokus pada peran dan manfaat SDI.	Peningkatan Literasi Publik: Mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat dan OPD mengenai SDI dengan menghadirkan konten yang mudah diakses dan menarik.
		Laporan Kampanye Diseminasi Konten melalui kanal media sosial resmi (Instagram,	Perluasan Jangkauan Audiens: Memastikan sosialisasi SDI dapat menjangkau audiens

		YouTube) untuk meningkatkan <i>engagement</i> .	digital, menggantikan metode konvensional yang kurang menarik.
2	Melaksanakan <i>Workshop</i> Teknis Pemahaman Pedoman Hasil Revisi kepada OPD	Dokumen Pelaksanaan <i>Workshop</i> Interaktif yang membahas perubahan pedoman, studi kasus, dan simulasi penerapan aturan baru.	Sinkronisasi Implementasi: Mengatasi ketidaksinkronan implementasi kebijakan akibat kurangnya pemahaman OPD terhadap pedoman SDI yang direvisi.
		Laporan Tingkat Pemahaman OPD terhadap standar terbaru (misalnya metadata JIGN) pasca- <i>workshop</i> (dilengkapi dengan <i>pre-post test</i>).	Konsistensi Data Terjaga: Memastikan seluruh OPD memahami dan menerapkan standar terbaru secara konsisten, sehingga kualitas dan integrasi data terjaga.
7. Program Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja SDI			
7.1 Monitoring dan Evaluasi			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Pembuatan <i>Dashboard</i> Publik Monev SDI untuk transparansi	Website <i>Dashboard</i> Publik Monev SDI yang fungsional dan interaktif, dapat diakses secara <i>online</i> oleh masyarakat umum.	Peningkatan Transparansi: Mengatasi hambatan kurangnya akses informasi publik mengenai kinerja dan progres implementasi SDI.

		Integrasi Grafik dan Peta <i>Real-time</i> yang menampilkan data kinerja kunci SDI (misalnya tingkat utilisasi layanan, peta ketersediaan data, progres capaian).	Pembangunan Kepercayaan Publik: Mewujudkan akuntabilitas kinerja institusi melalui keterbukaan informasi dan visualisasi data yang langsung terbuka.
2	Melaksanakan <i>Meeting</i> evaluasi dilakukan secara terjadwal	Jadwal Tetap Rapat Evaluasi Triwulanan yang disepakati, didokumentasikan dalam kalender resmi, dan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan inti.	Perbaikan Kinerja Berkelanjutan: Mengatasi hambatan evaluasi yang insidental, memungkinkan proses perbaikan kinerja SDI berjalan secara berkelanjutan dan terukur.
		Notulen Rapat yang Sistematis mencantumkan poin evaluasi, keputusan, daftar tugas, serta penanggung jawab dan <i>deadline</i> tindak lanjut.	Akuntabilitas Internal: Memastikan setiap keputusan evaluasi menghasilkan tindak lanjut yang jelas, terukur, dan terakuntabilitas.
8 Program Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan SDI			
8.1 Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan SDI			
No	Aksi	Output	Outcome
1	Dibentuk Forum Koordinasi Teknis SDI bulanan/tri-wulan	Dokumen SK Pembentukan Forum Koordinasi Teknis SDI yang menetapkan anggota dan jadwal	Peningkatan Sinergi: Mengatasi hambatan koordinasi yang reaktif, memastikan implementasi SDI berjalan lebih terintegrasi dan efektif.

		pertemuan berkala (bulanan/triwulanan).	
		Notula Rapat Forum yang Terstruktur yang mencantumkan laporan perkembangan, kendala teknis, dan solusi kolaboratif yang disepakati.	Penyelesaian Masalah Cepat: Tersedianya wadah strategis untuk menyelaraskan pemahaman dan memecahkan kendala teknis secara kolaboratif.
2	Pembentukan <i>coaching clinic</i> untuk OPD yang masih rendah kualitas datanya	Jadwal dan Laporan Pelaksanaan <i>Coaching Clinic</i> yang menunjukkan pendampingan teknis intensif (<i>hands-on</i>) untuk OPD dengan kualitas data rendah.	Percepatan Peningkatan Mutu Data: Mengatasi hambatan kurangnya kapasitas SDM dan mendorong percepatan peningkatan mutu data secara spesifik.
		Dokumen Solusi Korektif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap OPD, berfokus pada pemecahan masalah nyata (pengumpulan, pemrosesan).	Solusi Berkelanjutan: Peningkatan kualitas data didorong melalui bimbingan dan solusi yang disesuaikan, berbeda dari pelatihan umum yang teoritis.

3	Pelatihan memanfaatkan <i>learning management system</i> (LMS) untuk modul digital	Dokumen Kurikulum dan Modul Digital SDI yang telah terintegrasi dan dapat diakses melalui platform LMS.	Konsistensi Pelatihan: Mengatasi hambatan akses dan konsistensi pelatihan, memastikan materi didistribusikan secara merata kepada semua OPD.
		Laporan Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan Platform LMS bagi seluruh pegawai OPD untuk pemanfaatan modul digital.	Ekosistem Pembelajaran: Menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan, efisien, dan terukur untuk terus meningkatkan kompetensi SDM.

4.2 Penanggung Jawab dan Pelaksana

Implementasi inisiatif Satu Data di Kabupaten Pasuruan memerlukan kolaborasi yang terstruktur, terkoordinasi, dan adanya kejelasan peran dari berbagai pemangku kepentingan. Sub bab ini menyajikan matriks penanggung jawab dan pelaksana untuk setiap kegiatan utama yang telah diidentifikasi pada Sub Bab 6.1 Program dan Kegiatan. Pemetaan peran dan tanggung jawab ini menggunakan pendekatan RASCI Matrix (*Responsible, Accountable, Support, Consulted, dan Informed*) untuk memastikan kejelasan peran, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan potensi tumpang tindih tanggung jawab dalam pelaksanaan program SDI.

Adapun keterangan peran yang digunakan dalam Matriks RASCI adalah sebagai berikut:

- R (Responsible): Pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan secara operasional. (Pekerja atau pelaksana kegiatan).
- A (Accountable): Pihak yang memiliki otoritas final dan akuntabilitas terhadap keberhasilan kegiatan. (Pemilik hasil atau pengambil keputusan tertinggi).
- S (Support): Pihak yang memberikan dukungan sumber daya, masukan, atau bantuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
- C (Consulted): Pihak yang pendapatnya diminta dan dipertimbangkan sebelum keputusan final atau tindakan diambil. (Pihak yang memiliki keahlian atau *stakeholder* penting).
- I (Informed): Pihak yang perlu diberitahu tentang kemajuan atau hasil kegiatan, tetapi tidak terlibat langsung dalam pengambilan Keputusan

1. Program Peningkatan KapasitasD3:L61 SDM								
1.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Pasuruan								
Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	BPS	Pembina Data Geospasial
1. Pelatihan Kegiatan Statistik Sektorial bagi ASN pengelola data	I	A	R	C	S	S	S	I
2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM SDI yang Terstruktur	I	A	R	C	S	S	S	S
3. Rekrutmen SDM Ahli Bidang Teknologi Digital/Statistisi/Data Science	A	C	R	C	I	S	I	I
1.2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Pasuruan								

Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial
1. Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Data dan Metadata	I	A	R	C	S	S	S	S
2. Pelaksanaan <i>Bootcamp</i> Teknis	I	A	R	C	S	S	S	S
3. Program <i>Training of Trainers</i> (ToT) Agen Perubahan SDI	I	A	R	S	I	S	C	C
1.3 Penyelenggaraan Bimtek Metadata Kabupaten Pasuruan								
Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial

1. Pelatihan Penyusunan Metadata Statistik dan Geospasial	I	A	R	C	S	S	S	S
2. Pembentukan Kelompok Kerja Metadata Sektoral	I	A	R	C	R	S	C	C
3. <i>Workshop</i> Verifikasi dan Harmonisasi Metadata Lintas OPD	I	A	R	C	S	S	C	C
1. 4. Keikutsertaan dalam Bimtek yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat								
Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial
1. Keikutsertaan dalam Bimtek dan Workshop Pemerintah Pusat	I	A	R	S	S	S	C	C

2. Partisipasi Aktif dalam Forum Koordinasi Nasional Satu Data Indonesia	I	A	R	C	I	S	R	R
2. Program Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur Teknologi Informasi untuk SDI								
2.1. Integrasi Portal SDI Kabupaten Pasuruan dengan Aplikasi Lain								
Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial
1. Pemetaan Aplikasi dengan <i>Prioritization Matrix</i>	I	A	R	C	S	S	C	C
2. Penyusunan <i>API Documentation</i>	I	A	R	C	S	S	C	C
3. Implementasi <i>Automated Scheduled Sync</i>	I	A	R	C	R	S	C	C
2.2 Sistem Tata Kelola Data dalam Portal SDI								

Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial
Tinjauan Ulang dan Perbaikan SOP Pengelolaan Portal SDI	I	A	R	C	S	R	C	C
3. Program Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola Penyelenggaraan SDI								
3.1 Penyempurnaan Pedoman Prinsip SDI pada Penyelenggara Statistik								
Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial
Penyempurnaan Pedoman dan Standarisasi Proses Statistik Sektoral Implementasi	I	A	R	C	S	S	C	C
4. Program Pengelolaan Data Prioritas dan Statistik Sektoral								
4.1 Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas								

Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial
1. Pengembangan Platform Pengumpulan Data Berbasis Web	I	A	R	C	S	S	C	I
2. Pembuatan Basis Data Geospasial Terstandar Lintas OPD	I	A	R	C	S	S	C	R
5.Program Penjaminan Kualitas dan Verifikasi Data Pemerintah Daerah								
5.1 Desk keterisian, updating, verifikasi dan validasi								
Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial

Audit Teknis dan Pendampingan Korektif untuk Penjaminan Kualitas Data	I	A	R	R	S	S	C	C
5.2 Rekomendasi Kegiatan Statistik								
Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial
1. Penyusunan Modul <i>E-Learning</i> Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Statistik	I	A	R	C	S	S	C	I
2. Pembuatan Video Tutorial & <i>Template</i> Digital	I	A	R	C	S	S	C	I
3. Membuat Grup Koordinasi Terpadu (BPS-OPD-Wali Data)	I	A	R	C	S	S	R	I

4. Pembuatan <i>QR Code</i> Verifikasi Dokumen	I	A	R	I	I	S	R	I
5.3 Penyusunan Metadata Statistik								
Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial
1. Melakukan <i>Upgrade</i> Pelatihan Teknis Penyusunan Metadata Statistik sesuai format SDI.	I	A	R	C	S	S	S	C
2. Pembuatan Sistem Tiket Perbaikan Metadata (<i>Tracking/Dashboard</i>)	I	A	R	C	R	S	C	C
6 Program Diseminasi dan Aksesibilitas Data Kabupaten Pasuruan								
6.1 Melaksanakan Publikasi Data								

Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial
1. Implementasi Sistem Kalender Rilis Data Terintegrasi	I	A	R	C	R	S	C	C
2. Standardisasi <i>Template</i> Infografis dengan <i>QR Code</i>	I	A	R	C	S	S	C	C
6.2 Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Data								
Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial

1. Pembuatan <i>Microlearning</i>/Video Pendek Edukasi tentang SDI untuk Media Sosial	I	A	R	C	S	S	C	C
2. Melaksanakan <i>Workshop</i> Teknis Pemahaman Pedoman Hasil Revisi kepada OPD	I	A	R	R	S	S	C	C
7. Program Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja SDI								
7.1 Monitoring dan Evaluasi								
Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial
1. Pembuatan <i>Dashboard</i> Publik Monev SDI untuk transparansi	I	A	R	S	C	S	C	C

2. Melaksanakan <i>Meeting</i> evaluasi dilakukan secara terjadwal	I	A	R	R	S	R	C	C
8 Program Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan SDI								
8.1 Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan SDI								
Kegiatan Utama	Dewan Pengarah	Forum Satu Data	Wali Data	Wali Data Pendukung	Produsen Data	Sekretariat Satu Data	Pembina Data Statistik (BPS)	Pembina Data Geospasial
1. Dibentuk Forum Koordinasi Teknis SDI bulanan/tri-wulan	I	A	R	R	S	S	C	C
2. Pembentukan <i>coaching clinic</i> untuk OPD yang masih rendah kualitas datanya	I	A	R	R	S	S	C	C

3. Pelatihan memanfaatkan <i>learning management system (LMS)</i> untuk modul digital	I	A	R	C	S	S	C	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan implementasi inisiatif Satu Data di Kabupaten Pasuruan. Sub bab ini menyajikan IKU dan target untuk setiap program dan kegiatan utama yang telah diidentifikasi pada Sub Bab 6.1, dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab 3. IKU dan target ini dirancang dengan mengikuti prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas dalam kegiatan *monitoring* dan evaluasi implementasi SDI secara berkelanjutan. Berikut adalah IKU Program:

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase OPD yang memiliki minimal 2 ASN terlatih dalam pengelolaan data	0%	30%	50%	75%	90%	95%
2	Program Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur Teknologi Informasi untuk SDI	Persentase aplikasi OPD yang terintegrasi API dengan Portal SDI	0%	15%	35%	55%	75%	90%
		Tingkat Ketersediaan (<i>Uptime</i>) Portal SDI	90%	95%	98%	99%	99%	99.50 %
3	Program Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola	Indeks Kematangan Tata Kelola Data (skala 1-5)	0	0.5	1	1.75	2.5	3.25

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	Penyelenggaraa n SDI	Persentase kepatuhan OPD terhadap kebijakan Satu Data	0%	20%	40%	60%	75%	95%
4	Program Pengelolaan Data Prioritas dan Statistik Sektoral	Persentase <i>Dataset</i> Prioritas yang dikelola sesuai standar statistik sektoral	0%	30%	50%	75%	90%	100%
		Jumlah Daftar Data Prioritas yang dimutakhirkan per tahun	1	1	2	2	2	2
5	Program Penjaminan Kualitas dan Verifikasi Data Pemerintah Daerah	Persentase <i>dataset</i> prioritas yang memenuhi standar kualitas data	0%	30%	50%	75%	90%	90%
		Persentase <i>dataset</i> prioritas yang memiliki metadata lengkap	0%	30%	60%	80%	90%	100%
6	Program Diseminasi dan Aksesibilitas Data Kabupaten Pasuruan	Tingkat kepuasan pengguna Portal Data (skala 1-5)	Belum diukur	Belum diukur	3.5	3.7	4	4.3

No	Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		Jumlah total <i>dataset</i> yang tersedia di Portal Data	0	50	150	300	500	750
7	Program Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja SDI	Jumlah <i>meeting</i> evaluasi kinerja yang menghasilkan <i>action list</i> tindak lanjut	2	4	4	4	4	4
		Tingkat Pemanfaatan <i>Dashboard</i> Monev Publik (rata-rata kunjungan bulanan)	0	50	150	300	500	800
8	Program Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan SDI	Jumlah inovasi layanan publik berbasis data	0	1	3	6	10	15
		Jumlah total unduhan data dari Portal Data per tahun	0	100	1	2.5	5	10
		Indeks Literasi Data ASN (skala 1-100)	Belum diukur	Baseline	Naik 10%	Naik 20%	Naik 25%	Naik 30%

IKU per Program yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas SDM									
No	Aksi	IKU Tingkat Aksi	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Pasuruan									
1	Pelatihan Kegiatan Statistik Sektoral bagi ASN pengelola data	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi (<i>post-test</i>)	%	Initial Score (50%)	70%	75%	80%	85%	90%
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM SDI yang Terstruktur	Persentase ASN yang disertifikasi sebagai pengelola data SDI (<i>level basic</i>)	%	0%	20%	40%	60%	80%	90%
3	Rekrutmen SDM Ahli Bidang Teknologi Digital/Statistisi/Data Science	Jumlah formasi SDM ahli teknologi digital/statistisi yang terisi	Orang	0	1	2	2	3	3
1.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Pasuruan									
1	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Data dan Metadata	Persentase peserta Bimtek yang menghasilkan draf standar data/metadata yang disetujui	%	0%	50%	65%	75%	85%	90%

2	Pelaksanaan <i>Bootcamp</i> Teknis	Jumlah jam pelatihan teknis intensif (<i>hands-on</i>) yang terselenggara	Jam	0	20	40	60	60	60
3	Program <i>Training of Trainers</i> (ToT) Agen Perubahan SDI	Jumlah Agen Perubahan SDI yang tersertifikasi dan mendapatkan SK Penugasan	Orang	0	5	10	15	20	25
1.3 Penyelenggaraan Bimtek Metadata Kabupaten Pasuruan									
1	Pelatihan Penyusunan Metadata Statistik dan Geospasial	Persentase <i>dataset</i> baru yang dilengkapi metadata lengkap (<i>compliance rate</i>)	%	0%	40%	60%	75%	85%	95%
2	Pembentukan Kelompok Kerja Metadata Sektoral	Jumlah Pokja Metadata Sektoral yang dibentuk dan menerbitkan <i>output</i> harmonisasi	Kelompok	0	3	5	7	7	7
3	<i>Workshop</i> Verifikasi dan Harmonisasi Metadata Lintas OPD	Persentase rekomendasi harmonisasi metadata hasil <i>workshop</i> yang disepakati oleh OPD	%	0%	70%	80%	85%	90%	95%

1.4 Keikutsertaan dalam Bimtek yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat									
1	Keikutsertaan dalam Bimtek dan <i>Workshop</i> Pemerintah Pusat	Jumlah kegiatan Bimtek/Workshop yang diikuti oleh perwakilan daerah	Kegiatan	2	4	4	5	5	5
2	Partisipasi Aktif dalam Forum Koordinasi Nasional Satu Data Indonesia	Persentase isu/kendala SDI daerah yang diangkat dan mendapatkan <i>feedback</i> di Forkonas	%	0%	40%	60%	70%	80%	90%

No	Aksi	IKU Tingkat Aksi	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2. Program Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur Teknologi Informasi untuk SDI									
2.1 Integrasi Portal SDI Kabupaten Pasuruan dengan Aplikasi Lain									
1	Pemetaan Aplikasi dengan <i>Prioritization Matrix</i>	Jumlah <i>Prioritization Matrix</i> yang disahkan dan dijadikan <i>roadmap</i> integrasi	Satuan	0	1	1	0	0	0

No	Aksi	IKU Tingkat Aksi	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2	Penyusunan <i>API Documentation</i>	Persentase aplikasi prioritas yang memiliki <i>API Documentation</i> lengkap	%	0%	20%	40%	60%	80%	95%
3	Implementasi <i>Automated Scheduled Sync</i>	Persentase <i>dataset</i> prioritas yang data di Portalnya di- <i>update</i> melalui <i>automated scheduled sync</i>	%	0%	15%	35%	60%	80%	90%
2.2 Sistem Tata Kelola Data dalam Portal SDI									
1	Tinjauan Ulang dan Perbaikan SOP Pengelolaan Portal SDI	Persentase SOP Pengelolaan Portal SDI yang telah direvisi dan disosialisasikan	%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
3. Program Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola Penyelenggaraan SDI									
3.1 Penyempurnaan Pedoman Prinsip SDI pada Penyelenggara Statistik									

No	Aksi	IKU Tingkat Aksi	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Penyempurnaan Pedoman dan Standarisasi Proses Statistik Sektor Implementasi	Jumlah Pedoman Statistik Sektor yang disahkan dan diberlakukan	Dokumen	0	1	1	0	0	0
4.Program Pengelolaan Data Prioritas dan Statistik Sektor									
4.1 Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas									
1	Pengembangan Platform Pengumpulan Data Berbasis Web	Persentase <i>dataset</i> yang masuk ke <i>data warehouse</i> melalui <i>platform</i> pengumpulan berbasis <i>web</i>	%	0%	30%	50%	70%	85%	95%
2	Pembuatan Basis Data Geospasial Terstandar Lintas OPD	Persentase <i>dataset</i> geospasial prioritas yang terintegrasi dalam basis data terpusat	%	0%	25%	45%	65%	80%	90%

No	Aksi	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.Program Penjaminan Kualitas dan Verifikasi Data Pemerintah Daerah									
5.1 Desk keterisian, updating, verifikasi dan validasi									
1	Audit Teknis dan Pendampingan Korektif untuk Penjaminan Kualitas Data	Persentase rekomendasi perbaikan kualitas data dari audit yang ditindaklanjuti OPD	%	0%	40%	65%	80%	90%	95%
5.2 Rekomendasi Kegiatan Statistik									
1	Penyusunan Modul <i>E-Learning</i> Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Statistik	Persentase OPD yang memiliki ASN mengakses dan menyelesaikan modul <i>e-learning</i>	%	0%	50%	70%	85%	90%	95%

No	Aksi	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2	Pembuatan Video Tutorial & <i>Template</i> Digital	Jumlah <i>template</i> digital pengajuan rekomendasi yang tersedia	Dokumen	0	3	5	5	5	5
3	Membuat Grup Koordinasi Terpadu (BPS-OPD-Wali Data)	Rata-rata frekuensi respons BPS terhadap isu di grup koordinasi (dalam jam)	Jam	Initial (24)	12	8	6	4	4
4	Pembuatan <i>QR Code</i> Verifikasi Dokumen	Persentase dokumen rekomendasi statistik yang diterbitkan menggunakan <i>QR Code</i> verifikasi	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aksi	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.3 Penyusunan Metadata Statistik									
1	Melakukan <i>Upgrade</i> Pelatihan Teknis Penyusunan Metadata Statistik sesuai format SDI.	Persentase ASN pengelola data yang mendapatkan <i>upgrade</i> pelatihan metadata	%	0%	40%	60%	75%	85%	90%
2	Pembuatan Sistem Tiket Perbaikan Metadata (<i>Tracking/Dashboard</i>)	Persentase <i>issue</i> perbaikan metadata yang ditutup/diselesaikan dalam waktu 1 minggu	%	0%	50%	65%	80%	90%	95%
6 Program Diseminasi dan Aksesibilitas Data Kabupaten Pasuruan									
6.1 Melaksanakan Publikasi Data									

No	Aksi	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Implementasi Sistem Kalender Rilis Data Terintegrasi	Persentase <i>dataset</i> prioritas yang dirilis sesuai jadwal Kalender Rilis Data	%	0%	50%	70%	85%	95%	100%
2	Standardisasi <i>Template</i> Infografis dengan <i>QR Code</i>	Jumlah <i>template</i> infografis resmi yang disahkan dan dilengkapi <i>QR Code</i>	Dokumen	0	1	2	2	2	2
6.2 Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Data									

No	Aksi	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pembuatan <i>Microlearning</i> /Video Pendek Edukasi tentang SDI untuk Media Sosial	Jumlah konten edukasi SDI yang dipublikasikan di media sosial	Konten	0	12	18	24	24	24
2	Melaksanakan <i>Workshop</i> Teknis Pemahaman Pedoman Hasil Revisi kepada OPD	Persentase OPD yang mengirimkan minimal 1 perwakilan dalam <i>workshop</i> pedoman revisi	%	0%	80%	90%	90%	95%	95%
7. Program Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja SDI									
7.1 Monitoring dan Evaluasi									

No	Aksi	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pembuatan <i>Dashboard</i> Publik Monev SDI untuk transparansi	Tingkat Kunjungan Rata-rata Bulanan ke <i>Dashboard</i> Monev Publik	Kunjungan	0	100	250	500	800	1.2
2	Melaksanakan <i>Meeting</i> evaluasi dilakukan secara terjadwal	Persentase tindak lanjut hasil <i>meeting</i> evaluasi yang terselesaikan	%	0%	50%	70%	85%	90%	95%
8 Program Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan SDI									
8.1 Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan SDI									

No	Aksi	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dibentuk Forum Koordinasi Teknis SDI bulanan/tri-wulan	Rata-rata Tingkat Kehadiran Anggota Forum Koordinasi Teknis	%	0%	70%	80%	85%	90%	90%
2	Pembentukan <i>coaching clinic</i> untuk OPD yang masih rendah kualitas datanya	Persentase OPD yang kualitas datanya meningkat pasca <i>coaching clinic</i>	%	0%	30%	55%	75%	85%	90%
3	Pelatihan memanfaatkan <i>learning management system</i> (LMS) untuk modul digital	Jumlah modul <i>e-learning</i> SDI yang tersedia di LMS	Modul	0	3	6	9	12	15

4.4 Jadwal Pelaksanaan

Penyusunan jadwal pelaksanaan didasarkan pada analisis komprehensif terhadap urgensi, dampak strategis, dan ketergantungan antar kegiatan, sehingga menghasilkan tahapan implementasi yang logis dan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang bersifat fondasi dan prasyarat dilaksanakan terlebih dahulu (seperti penyusunan pedoman dan pembentukan tim), diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang bergantung padanya (seperti integrasi sistem dan diseminasi data). Berikut adalah jadwal pelaksanaan terperinci untuk seluruh kegiatan utama dalam implementasi Satu Data Kabupaten Pasuruan dari tahun 2025 hingga 2029 disetiap kuartal:

Tabel 1: Jadwal Pelaksanaan Tahun 2025 (Fokus: Pembentukan dan Penyusunan Dokumen Dasar)

Kegiatan Utama	Tahun 2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Peningkatan Kapasitas SDM				
Pelatihan Kegiatan Statistik Sektoral bagi ASN pengelola data		V	V	V
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM SDI yang Terstruktur		V	V	
Rekrutmen SDM Ahli Bidang Teknologi Digital/Statistisi/Data Science	V	V		
Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Data dan Metadata		V	V	
Pelaksanaan <i>Bootcamp</i> Teknis		V		
Program <i>Training of Trainers</i> (ToT) Agen Perubahan SDI		V	V	
Pelatihan Penyusunan Metadata Statistik dan Geospasial		V	V	
Pembentukan Kelompok Kerja Metadata Sektoral	V	V		
<i>Workshop</i> Verifikasi dan Harmonisasi Metadata Lintas OPD			V	
Keikutsertaan dalam Bimtek dan <i>Workshop</i> Pemerintah Pusat	V		V	
Partisipasi Aktif dalam Forum Koordinasi Nasional Satu Data Indonesia		V		V
Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur				
Pemetaan Aplikasi dengan <i>Prioritization Matrix</i>	V	V		

Kegiatan Utama	Tahun 2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Penyusunan <i>API Documentation</i>		V	V	V
Implementasi <i>Automated Scheduled Sync</i>			V	V
Tinjauan Ulang dan Perbaikan SOP Pengelolaan Portal SDI	V	V		
Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola				
Penyempurnaan Pedoman dan Standarisasi Proses Statistik Sektoral Implementasi	V	V		
Pengelolaan Data Prioritas dan Statistik Sektoral				
Pengembangan Platform Pengumpulan Data Berbasis Web	V	V	V	
Pembuatan Basis Data Geospasial Terstandar Lintas OPD	V	V	V	
Penjaminan Kualitas dan Verifikasi Data				
Audit Teknis dan Pendampingan Korektif untuk Penjaminan Kualitas Data		V	V	
Penyusunan Modul <i>E-Learning</i> Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Statistik	V	V		
Pembuatan Video Tutorial & <i>Template</i> Digital	V	V		
Membuat Grup Koordinasi Terpadu (BPS–OPD–Wali Data)	V	V	V	V
Pembuatan <i>QR Code</i> Verifikasi Dokumen	V	V		
Melakukan <i>Upgrade</i> Pelatihan Teknis Penyusunan Metadata Statistik sesuai format SDI.		V	V	
Pembuatan Sistem Tiket Perbaikan Metadata (<i>Tracking/Dashboard</i>)	V	V		
Diseminasi dan Aksesibilitas Data				
Implementasi Sistem Kalender Rilis Data Terintegrasi	V	V		
Standardisasi <i>Template</i> Infografis dengan <i>QR Code</i>	V	V		
Pembuatan <i>Microlearning</i> /Video Pendek Edukasi tentang SDI untuk Media Sosial		V	V	
Melaksanakan <i>Workshop</i> Teknis Pemahaman Pedoman Hasil Revisi kepada OPD		V		
Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja SDI				

Kegiatan Utama	Tahun 2025			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Pembuatan <i>Dashboard</i> Publik Monev SDI untuk transparansi	V	V		
Melaksanakan <i>Meeting</i> evaluasi dilakukan secara terjadwal	V	V	V	V
Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan SDI				
Dibentuk Forum Koordinasi Teknis SDI bulanan/tri-wulan	V	V	V	V
Pembentukan <i>coaching clinic</i> untuk OPD yang masih rendah kualitas datanya		V	V	
Pelatihan memanfaatkan <i>learning management system</i> (LMS) untuk modul digital		V	V	

Tabel 2: Jadwal Pelaksanaan Tahun 2026 (Fokus: Konsolidasi dan Peningkatan Implementasi)

Kegiatan Utama	Tahun 2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Peningkatan Kapasitas SDM				
Pelatihan Kegiatan Statistik Sektoral bagi ASN pengelola data	V	V	V	
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM SDI yang Terstruktur		V	V	
Rekrutmen SDM Ahli Bidang Teknologi Digital/Statistisi/Data Science	V			
Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Data dan Metadata		V		
Pelaksanaan <i>Bootcamp</i> Teknis		V	V	
Program <i>Training of Trainers</i> (ToT) Agen Perubahan SDI	V			
Pelatihan Penyusunan Metadata Statistik dan Geospasial		V	V	
Pembentukan Kelompok Kerja Metadata Sektoral	V	V		
<i>Workshop</i> Verifikasi dan Harmonisasi Metadata Lintas OPD		V		
Keikutsertaan dalam Bimtek dan <i>Workshop</i> Pemerintah Pusat	V		V	
Partisipasi Aktif dalam Forum Koordinasi Nasional Satu Data Indonesia		V		V
Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur				

Kegiatan Utama	Tahun 2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Pemetaan Aplikasi dengan <i>Prioritization Matrix</i>	V			
Penyusunan <i>API Documentation</i>		V	V	
Implementasi <i>Automated Scheduled Sync</i>	V	V	V	
Tinjauan Ulang dan Perbaikan SOP Pengelolaan Portal SDI				
Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola				
Penyempurnaan Pedoman dan Standarisasi Proses Statistik Sektoral Implementasi	V			
Pengelolaan Data Prioritas dan Statistik Sektoral				
Pengembangan Platform Pengumpulan Data Berbasis Web	V	V		
Pembuatan Basis Data Geospasial Terstandar Lintas OPD	V	V		
Penjaminan Kualitas dan Verifikasi Data				
Audit Teknis dan Pendampingan Korektif untuk Penjaminan Kualitas Data	V	V	V	
Penyusunan Modul <i>E-Learning</i> Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Statistik				
Pembuatan Video Tutorial & <i>Template</i> Digital				
Membuat Grup Koordinasi Terpadu (BPS–OPD–Wali Data)	V	V	V	V
Pembuatan <i>QR Code</i> Verifikasi Dokumen	V	V	V	V
Melakukan <i>Upgrade</i> Pelatihan Teknis Penyusunan Metadata Statistik sesuai format SDI.		V	V	
Pembuatan Sistem Tiket Perbaikan Metadata (<i>Tracking/Dashboard</i>)	V	V	V	V
Diseminasi dan Aksesibilitas Data				
Implementasi Sistem Kalender Rilis Data Terintegrasi	V	V	V	V
Standardisasi <i>Template</i> Infografis dengan <i>QR Code</i>	V			
Pembuatan <i>Microlearning</i> /Video Pendek Edukasi tentang SDI untuk Media Sosial	V	V	V	V
Melaksanakan <i>Workshop</i> Teknis Pemahaman Pedoman Hasil Revisi kepada OPD		V		

Kegiatan Utama	Tahun 2026			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja SDI				
Pembuatan <i>Dashboard</i> Publik Monev SDI untuk transparansi	V	V	V	V
Melaksanakan <i>Meeting</i> evaluasi dilakukan secara terjadwal	V	V	V	V
Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan SDI				
Dibentuk Forum Koordinasi Teknis SDI bulanan/tri-wulan	V	V	V	V
Pembentukan <i>coaching clinic</i> untuk OPD yang masih rendah kualitas datanya	V	V	V	
Pelatihan memanfaatkan <i>learning management system</i> (LMS) untuk modul digital		V		

Tabel 3: Jadwal Pelaksanaan Tahun 2027 (Fokus: Penguatan dan Reviu Berbasis Kebutuhan)

Kegiatan Utama	Tahun 2027			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Peningkatan Kapasitas SDM				
Pelatihan Kegiatan Statistik Sektoral bagi ASN pengelola data	V	V	V	
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM SDI yang Terstruktur		V	V	
Rekrutmen SDM Ahli Bidang Teknologi Digital/Statistisi/Data Science	V			
Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Data dan Metadata		V		
Pelaksanaan <i>Bootcamp</i> Teknis		V	V	
Program <i>Training of Trainers</i> (ToT) Agen Perubahan SDI	V			
Pelatihan Penyusunan Metadata Statistik dan Geospasial		V	V	
Pembentukan Kelompok Kerja Metadata Sektoral	V			
<i>Workshop</i> Verifikasi dan Harmonisasi Metadata Lintas OPD		V		
Keikutsertaan dalam Bimtek dan <i>Workshop</i> Pemerintah Pusat	V		V	
Partisipasi Aktif dalam Forum Koordinasi Nasional Satu Data Indonesia		V		V

Kegiatan Utama	Tahun 2027			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur				
Pemetaan Aplikasi dengan <i>Prioritization Matrix</i>				
Penyusunan <i>API Documentation</i>		V		
Implementasi <i>Automated Scheduled Sync</i>	V	V	V	V
Tinjauan Ulang dan Perbaikan SOP Pengelolaan Portal SDI				
Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola				
Penyempurnaan Pedoman dan Standarisasi Proses Statistik Sektoral Implementasi				
Pengelolaan Data Prioritas dan Statistik Sektoral				
Pengembangan Platform Pengumpulan Data Berbasis Web	V	V		
Pembuatan Basis Data Geospasial Terstandar Lintas OPD	V	V	V	
Penjaminan Kualitas dan Verifikasi Data				
Audit Teknis dan Pendampingan Korektif untuk Penjaminan Kualitas Data	V	V	V	V
Penyusunan Modul <i>E-Learning</i> Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Statistik				
Pembuatan Video Tutorial & <i>Template</i> Digital				
Membuat Grup Koordinasi Terpadu (BPS–OPD–Wali Data)	V	V	V	V
Pembuatan <i>QR Code</i> Verifikasi Dokumen	V	V	V	V
Melakukan <i>Upgrade</i> Pelatihan Teknis Penyusunan Metadata Statistik sesuai format SDI.		V	V	
Pembuatan Sistem Tiket Perbaikan Metadata (<i>Tracking/Dashboard</i>)	V	V	V	V
Diseminasi dan Aksesibilitas Data				
Implementasi Sistem Kalender Rilis Data Terintegrasi	V	V	V	V
Standardisasi <i>Template</i> Infografis dengan <i>QR Code</i>				
Pembuatan <i>Microlearning</i> /Video Pendek Edukasi tentang SDI untuk Media Sosial	V	V	V	V

Kegiatan Utama	Tahun 2027			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Melaksanakan <i>Workshop</i> Teknis Pemahaman Pedoman Hasil Revisi kepada OPD		V		
Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja SDI				
Pembuatan <i>Dashboard</i> Publik Monev SDI untuk transparansi	V	V	V	V
Melaksanakan <i>Meeting</i> evaluasi dilakukan secara terjadwal	V	V	V	V
Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan SDI				
Dibentuk Forum Koordinasi Teknis SDI bulanan/tri-wulan	V	V	V	V
Pembentukan <i>coaching clinic</i> untuk OPD yang masih rendah kualitas datanya	V	V	V	V
Pelatihan memanfaatkan <i>learning management system</i> (LMS) untuk modul digital		V	V	

Tabel 4: Jadwal Pelaksanaan Tahun 2028 (Fokus: Sustansi dan Pematangan Sistem)

Kegiatan Utama	Tahun 2028			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Peningkatan Kapasitas SDM				
Pelatihan Kegiatan Statistik Sektorial bagi ASN pengelola data	V	V	V	
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM SDI yang Terstruktur		V	V	
Rekrutmen SDM Ahli Bidang Teknologi Digital/Statistisi/Data Science	V			
Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Data dan Metadata		V		
Pelaksanaan <i>Bootcamp</i> Teknis		V		
Program <i>Training of Trainers</i> (ToT) Agen Perubahan SDI	V			
Pelatihan Penyusunan Metadata Statistik dan Geospasial		V	V	
Pembentukan Kelompok Kerja Metadata Sektorial	V			
<i>Workshop</i> Verifikasi dan Harmonisasi Metadata Lintas OPD		V		
Keikutsertaan dalam Bimtek dan <i>Workshop</i> Pemerintah Pusat	V		V	

Kegiatan Utama	Tahun 2028			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Partisipasi Aktif dalam Forum Koordinasi Nasional Satu Data Indonesia		V		V
Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur				
Pemetaan Aplikasi dengan <i>Prioritization Matrix</i>				
Penyusunan <i>API Documentation</i>		V		
Implementasi <i>Automated Scheduled Sync</i>	V	V	V	V
Tinjauan Ulang dan Perbaikan SOP Pengelolaan Portal SDI				
Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola				
Penyempurnaan Pedoman dan Standarisasi Proses Statistik Sektoral Implementasi				
Pengelolaan Data Prioritas dan Statistik Sektoral				
Pengembangan Platform Pengumpulan Data Berbasis Web	V	V	V	V
Pembuatan Basis Data Geospasial Terstandar Lintas OPD	V	V	V	
Penjaminan Kualitas dan Verifikasi Data				
Audit Teknis dan Pendampingan Korektif untuk Penjaminan Kualitas Data	V	V	V	V
Penyusunan Modul <i>E-Learning</i> Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Statistik				
Pembuatan Video Tutorial & <i>Template</i> Digital				
Membuat Grup Koordinasi Terpadu (BPS–OPD–Wali Data)	V	V	V	V
Pembuatan <i>QR Code</i> Verifikasi Dokumen	V	V	V	V
Melakukan <i>Upgrade</i> Pelatihan Teknis Penyusunan Metadata Statistik sesuai format SDI.		V	V	
Pembuatan Sistem Tiket Perbaikan Metadata (<i>Tracking/Dashboard</i>)	V	V	V	V
Diseminasi dan Aksesibilitas Data				
Implementasi Sistem Kalender Rilis Data Terintegrasi	V	V	V	V
Standardisasi <i>Template</i> Infografis dengan <i>QR Code</i>				

Kegiatan Utama	Tahun 2028			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Pembuatan <i>Microlearning</i> /Video Pendek Edukasi tentang SDI untuk Media Sosial	V	V	V	V
Melaksanakan <i>Workshop</i> Teknis Pemahaman Pedoman Hasil Revisi kepada OPD		V		
Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja SDI				
Pembuatan <i>Dashboard</i> Publik Monev SDI untuk transparansi	V	V	V	V
Melaksanakan <i>Meeting</i> evaluasi dilakukan secara terjadwal	V	V	V	V
Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan SDI				
Dibentuk Forum Koordinasi Teknis SDI bulanan/tri-wulan	V	V	V	V
Pembentukan <i>coaching clinic</i> untuk OPD yang masih rendah kualitas datanya	V	V	V	V
Pelatihan memanfaatkan <i>learning management system</i> (LMS) untuk modul digital		V		

Tabel 5: Jadwal Pelaksanaan Tahun 2029 (Fokus: Keberlanjutan, Inovasi, dan Kematangan)

Kegiatan Utama	Tahun 2029			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Peningkatan Kapasitas SDM				
Pelatihan Kegiatan Statistik Sektoral bagi ASN pengelola data	V	V	V	
Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM SDI yang Terstruktur		V	V	
Rekrutmen SDM Ahli Bidang Teknologi Digital/Statistisi/Data Science	V			
Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Data dan Metadata		V		
Pelaksanaan <i>Bootcamp</i> Teknis		V		
Program <i>Training of Trainers</i> (ToT) Agen Perubahan SDI	V			
Pelatihan Penyusunan Metadata Statistik dan Geospasial		V	V	
Pembentukan Kelompok Kerja Metadata Sektoral	V			

Kegiatan Utama	Tahun 2029			
	Q1	Q2	Q3	Q4
<i>Workshop</i> Verifikasi dan Harmonisasi Metadata Lintas OPD		V		
Keikutsertaan dalam Bimtek dan <i>Workshop</i> Pemerintah Pusat	V		V	
Partisipasi Aktif dalam Forum Koordinasi Nasional Satu Data Indonesia		V		V
Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur				
Pemetaan Aplikasi dengan <i>Prioritization Matrix</i>				
Penyusunan <i>API Documentation</i>		V		
Implementasi <i>Automated Scheduled Sync</i>	V	V	V	V
Tinjauan Ulang dan Perbaikan SOP Pengelolaan Portal SDI				
Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola				
Penyempurnaan Pedoman dan Standarisasi Proses Statistik Sektoral Implementasi				
Pengelolaan Data Prioritas dan Statistik Sektoral				
Pengembangan Platform Pengumpulan Data Berbasis Web	V	V	V	V
Pembuatan Basis Data Geospasial Terstandar Lintas OPD	V	V	V	
Penjaminan Kualitas dan Verifikasi Data				
Audit Teknis dan Pendampingan Korektif untuk Penjaminan Kualitas Data	V	V	V	V
Penyusunan Modul <i>E-Learning</i> Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Statistik				
Pembuatan Video Tutorial & <i>Template</i> Digital				
Membuat Grup Koordinasi Terpadu (BPS–OPD–Wali Data)	V	V	V	V
Pembuatan <i>QR Code</i> Verifikasi Dokumen	V	V	V	V
Melakukan <i>Upgrade</i> Pelatihan Teknis Penyusunan Metadata Statistik sesuai format SDI.		V	V	
Pembuatan Sistem Tiket Perbaikan Metadata (<i>Tracking/Dashboard</i>)	V	V	V	V
Diseminasi dan Aksesibilitas Data				
Implementasi Sistem Kalender Rilis Data Terintegrasi	V	V	V	V

Kegiatan Utama	Tahun 2029			
	Q1	Q2	Q3	Q4
Standardisasi <i>Template</i> Infografis dengan <i>QR Code</i>				
Pembuatan <i>Microlearning</i> /Video Pendek Edukasi tentang SDI untuk Media Sosial	V	V	V	V
Melaksanakan <i>Workshop</i> Teknis Pemahaman Pedoman Hasil Revisi kepada OPD		V		
Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja SDI				
Pembuatan <i>Dashboard</i> Publik Monev SDI untuk transparansi	V	V	V	V
Melaksanakan <i>Meeting</i> evaluasi dilakukan secara terjadwal	V	V	V	V
Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan SDI				
Dibentuk Forum Koordinasi Teknis SDI bulanan/tri-wulan	V	V	V	V
Pembentukan <i>coaching clinic</i> untuk OPD yang masih rendah kualitas datanya	V	V	V	V
Pelatihan memanfaatkan <i>learning management system</i> (LMS) untuk modul digital		V		

Tabel 6. Jadwal pelaksanaan kegiatan dalam implementasi Satu Data Kabupaten Pasuruan tahun 2025 hingga 2029

No	Output	Rincian Output	Aksi	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
1	Peningkatan Kapasitas SDM	1.1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Pasuruan	Pelatihan Kegiatan Statistik Sektoral bagi ASN pengelola data	Persentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi (<i>post-test</i>)	70%	75%	80%	85%	90%
			Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM SDI yang Terstruktur	Persentase ASN yang disertifikasi sebagai pengelola data SDI (<i>level basic</i>)	20%	40%	60%	80%	90%
			Rekrutmen SDM Ahli Bidang Teknologi Digital/Statistisi/Data Science	Jumlah formasi SDM ahli teknologi digital/statistisi yang terisi	1	2	2	3	3
		1.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tim Penyelenggara SDI Kabupaten Pasuruan	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Data dan Metadata	Persentase peserta Bimtek yang menghasilkan draf standar data/metadata yang disetujui	50%	65%	75%	85%	90%
			Pelaksanaan <i>Bootcamp</i> Teknis	Jumlah jam pelatihan teknis intensif (<i>hands-on</i>) yang terselenggara	20	40	60	60	60
			Program <i>Training of Trainers</i> (ToT) Agen Perubahan SDI	Jumlah Agen Perubahan SDI yang tersertifikasi dan	5	10	15	20	25

No	Output	Rincian Output	Aksi	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
		1.3 Penyelenggaraan Bimtek Metadata Kabupaten Pasuruan		mendapatkan SK Penugasan					
			Pelatihan Penyusunan Metadata Statistik dan Geospasial	Persentase <i>dataset</i> baru yang dilengkapi metadata lengkap (<i>compliance rate</i>)	40%	60%	75%	85%	95%
			Pembentukan Kelompok Kerja Metadata Sektor	Jumlah Pokja Metadata Sektor yang dibentuk dan menerbitkan <i>output</i> harmonisasi	3	5	7	7	7
			<i>Workshop</i> Verifikasi dan Harmonisasi Metadata Lintas OPD	Persentase rekomendasi harmonisasi metadata hasil <i>workshop</i> yang disepakati oleh OPD	70%	80%	85%	90%	95%
		1.4 Keikutsertaan dalam Bimtek yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat	Keikutsertaan dalam Bimtek dan <i>Workshop</i> Pemerintah Pusat	Jumlah kegiatan Bimtek/ <i>Workshop</i> yang diikuti oleh perwakilan daerah	4	4	5	5	5
			Partisipasi Aktif dalam Forum Koordinasi Nasional Satu Data Indonesia	Persentase isu dan kendala SDI daerah berhasil diangkat dan memperoleh tanggapan	40%	60%	70%	80%	90%

No	Output	Rincian Output	Aksi	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
				(feedback) pada Forum Koordinasi Nasional Satu Data Indonesia					
2	Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur Teknologi Informasi untuk SDI	2.1 Integrasi Portal SDI Kabupaten Pasuruan dengan Aplikasi Lain	Pemetaan Aplikasi dengan <i>Prioritization Matrix</i>	Jumlah <i>Prioritization Matrix</i> yang disahkan dan dijadikan <i>roadmap</i> integrasi	1	1	0	0	0
			Penyusunan <i>API Documentation</i>	Persentase aplikasi prioritas yang memiliki <i>API Documentation</i> lengkap	20%	40%	60%	80%	95%
			Implementasi <i>Automated Scheduled Sync</i>	Persentase data <i>dataset</i> prioritas yang diperbarui Portal SDI secara terjadwal dan otomatis	15%	35%	60%	80%	90%
		2.2 Sistem Tata Kelola Data dalam Portal SDI	Tinjauan Ulang dan Perbaikan SOP Pengelolaan Portal SDI	Persentase SOP Pengelolaan Portal SDI yang telah direvisi dan disosialisasikan	100%	0%	0%	0%	0%
3	Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola	3.1 Penyempurnaan Pedoman Prinsip	Penyempurnaan Pedoman dan Standarisasi Proses	Jumlah Pedoman Statistik Sektoral	1	1	0	0	0

No	Output	Rincian Output	Aksi	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
	Penyelenggaraan SDI	SDI pada Penyelenggara Statistik	Statistik Sektoral Implementasi	yang disahkan dan diberlakukan					
4	Pengelolaan Data Prioritas dan Statistik Sektoral	4.1 Penyusunan Daftar Data dan Data Prioritas	Pengembangan Platform Pengumpulan Data Berbasis Web	Persentase <i>dataset</i> yang masuk ke <i>data warehouse</i> melalui <i>platform</i> pengumpulan berbasis <i>web</i>	30%	50%	70%	85%	95%
			Pembuatan Basis Data Geospasial Terstandar Lintas OPD	Persentase <i>dataset</i> geospasial prioritas yang terintegrasi dalam basis data terpusat	25%	45%	65%	80%	90%
5	Penjaminan Kualitas dan Verifikasi Data Pemerintah Daerah	5.1 Desk keterisian, updating, verifikasi dan validasi	Audit Teknis dan Pendampingan Korektif untuk Penjaminan Kualitas Data	Persentase rekomendasi perbaikan kualitas data dari audit yang ditindaklanjuti OPD	40%	65%	80%	90%	95%
		5.2 Rekomendasi Kegiatan Statistik	Penyusunan Modul <i>E-Learning</i> Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Statistik	Persentase OPD yang memiliki ASN mengakses dan menyelesaikan modul <i>e-learning</i>	50%	70%	85%	90%	95%
			Pembuatan Video Tutorial & <i>Template</i> Digital	Jumlah <i>template</i> digital pengajuan	3	5	5	5	5

No	Output	Rincian Output	Aksi	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
				rekomenadasi yang tersedia					
			Membuat Grup Koordinasi Terpadu (BPS-OPD-Wali Data)	Rata-rata frekuensi respons BPS terhadap isu di grup koordinasi (dalam jam)	12	8	6	4	4
			Pembuatan <i>QR Code</i> Verifikasi Dokumen	Persentase dokumen rekomendasi statistik yang diterbitkan menggunakan <i>QR Code</i> verifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
		5.3Penyusunan Metadata Statistik	Melakukan <i>Upgrade</i> Pelatihan Teknis Penyusunan Metadata Statistik sesuai format SDI.	Persentase ASN pengelola data yang mendapatkan <i>upgrade</i> pelatihan metadata	40%	60%	75%	85%	90%
			Pembuatan Sistem Tiket Perbaikan Metadata (<i>Tracking/Dashboard</i>)	Persentase <i>issue</i> perbaikan metadata yang ditutup/diselesaikan dalam waktu 1 minggu	50%	65%	80%	90%	95%
6	Diseminasi dan Aksesibilitas	6.1 Melaksanakan Publikasi Data	Implementasi Sistem Kalender Rilis Data Terintegrasi	Persentase <i>dataset</i> prioritas yang dirilis	50%	70%	85%	95%	100%

No	Output	Rincian Output	Aksi	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
	Data Kabupaten Pasuruan			sesuai jadwal Kalender Rilis Data					
			Standardisasi <i>Template</i> Infografis dengan <i>QR Code</i>	Jumlah <i>template</i> infografis resmi yang disahkan dan dilengkapi <i>QR Code</i>	1	2	2	2	2
		6.2 Pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Data	Pembuatan <i>Microlearning</i> /Video Pendek Edukasi tentang SDI untuk Media Sosial	Jumlah konten edukasi SDI yang dipublikasikan di media sosial	12	18	24	24	24
			Melaksanakan <i>Workshop</i> Teknis Pemahaman Pedoman Hasil Revisi kepada OPD	Persentase OPD yang mengirimkan minimal 1 perwakilan dalam <i>workshop</i> pedoman revisi	80%	90%	90%	95%	95%
7	Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Kinerja SDI	7.1 Monitoring dan Evaluasi	Pembuatan <i>Dashboard</i> Publik Monev SDI untuk transparansi	Tingkat Kunjungan Rata-rata Bulanan ke <i>Dashboard</i> Monev Publik	100	250	500	800	1,2
			Melaksanakan <i>Meeting</i> evaluasi dilakukan secara terjadwal	Persentase tindak lanjut hasil <i>meeting</i> evaluasi yang terselesaikan	50%	70%	85%	90%	95%

No	Output	Rincian Output	Aksi	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
8	Kegiatan Lain yang Mendukung Pelaksanaan SDI	8.1 Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan SDI	Dibentuk Forum Koordinasi Teknis SDI bulanan/tri-wulan	Rata-rata Tingkat Kehadiran Anggota Forum Koordinasi Teknis	70%	80%	85%	90%	90%
			Pembentukan <i>coaching clinic</i> untuk OPD yang masih rendah kualitas datanya	Persentase OPD yang kualitas datanya meningkat pasca <i>coaching clinic</i>	30%	55%	75%	85%	90%
			Pelatihan memanfaatkan <i>learning management system</i> (LMS) untuk modul digital	Jumlah modul <i>e-learning</i> SDI yang tersedia di LMS	3	6	9	12	15

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Pasuruan ini merupakan sebuah kerangka kerja strategis dan operasional yang komprehensif, dirancang untuk mentransformasi pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menuju praktik tata kelola data yang modern, terintegrasi, dan berbasis bukti. Inti dari dokumen ini terletak pada kerangka strategis yang dibangun secara holistik, mencakup penguatan regulasi, penataan kelembagaan, standarisasi proses, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, hingga aspek teknis infrastruktur dan integrasi sistem. Prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (SDI) diadopsi secara konsisten dan diselaraskan dengan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional, memastikan bahwa inisiatif ini tidak berjalan terisolasi, melainkan menjadi bagian integral dari upaya transformasi digital pemerintahan yang lebih luas. Struktur tata kelola dan kelembagaan yang dirancang memberikan fondasi organisasional yang kuat, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas melalui Forum Satu Data, Walidata, hingga Produsen Data, yang diperkuat melalui mekanisme koordinasi terstruktur seperti yang disajikan dalam Matriks RASCI.

Keberhasilan implementasi Rencana Aksi ini akan sangat bergantung pada eksekusi Program Aksi yang telah ditetapkan, khususnya penekanan pada Program Pengembangan dan Integrasi Infrastruktur Teknologi Informasi untuk SDI dan Program Penjaminan Kualitas dan Verifikasi Data Pemerintah Daerah. Program infrastruktur ini berfungsi sebagai pemungkin utama (*Subjek-Predikat-Keterangan*) untuk mewujudkan aksesibilitas dan *interoperability* data, sementara program penjaminan kualitas data memastikan bahwa data yang dihasilkan memenuhi standar akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Dengan fondasi kelembagaan yang kuat, diikuti dengan pelaksanaan terukur dari program-program tersebut—didukung IKU yang SMART dan jadwal yang terperinci—diharapkan Satu Data Kabupaten Pasuruan dapat terwujud secara optimal, menghasilkan data yang andal untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat, efisien, dan efektif.

demi peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

5 BAB V.

PEDOMAN PELAKSANAAN STATISTIK SEKTORAL

Buku Pedoman Statistik Sektoral ini disusun dengan tujuan utama untuk menjadi panduan komprehensif bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Pedoman ini memastikan bahwa kegiatan statistik, mulai dari perencanaan hingga penyebarluasan, dilakukan secara terpadu, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (SDI). Dengan demikian, kualitas data yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang lebih berbasis bukti (*evidence-based*).

5.1 DOMAIN 1 - PRINSIP SATU DATA INDONESIA (SDI)

Tujuan pembuatan buku pedoman pada domain 1 adalah untuk mengatur tata kelola data pemerintah agar data dihasilkan, dikelola, dan dibagikan secara efektif antarinstansi. Domain ini bertujuan mewujudkan data yang seragam, interoperabel, dan menjadi sumber tunggal yang dapat dipercaya (*single source of truth*) dalam ekosistem data pemerintah daerah.

Isi umum dari domain ini mencakup:

- Standar Data Statistik (SDS): Fondasi utama yang harus dipatuhi, meliputi Konsep, Definisi, Klasifikasi, Ukuran, dan Satuan yang seragam untuk semua data sektoral. Kepatuhan terhadap SDS ini penting untuk menjamin perbandingan dan konsistensi data lintas sektor.
- Metadata Statistik: Penjelasan tentang *data tentang data* yang wajib disertakan, terdiri dari Metadata Statistik Kegiatan (MS-Keg), Metadata Statistik Variabel (MS-Var), dan Metadata Statistik Indikator (MS-Ind). Metadata berfungsi untuk memberikan konteks, sumber, dan metodologi data.

5.2 DOMAIN 2 - KUALITAS DATA

Tujuan pembuatan buku pedoman pada domain 2 adalah untuk menjamin data statistik sektoral yang dihasilkan memiliki dimensi kualitas yang tinggi, dengan

penekanan khusus pada dimensi Relevansi. Domain ini memandu OPD untuk memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan pengguna data, terutama untuk mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Isi umum dari domain ini difokuskan pada:

- Relevansi Data Terhadap Pengguna: Menilai kesesuaian data yang akan diproduksi dengan kebutuhan riil pengguna data di tingkat daerah.
- Peta Proses Bisnis dan Tata Kelola Relevansi: Memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana OPD dapat mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menyelaraskan data yang akan mereka produksi agar tetap relevan dan bermanfaat bagi siklus kebijakan.

5.3 DOMAIN 3 - PROSES BISNIS STATISTIK

Tujuan pembuatan buku pedoman pada domain 3 adalah untuk memastikan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan statistik dilakukan secara sistematis, terstandar, dan berkesinambungan sesuai dengan siklus kerja statistik yang baku. Hal ini untuk menjamin konsistensi, validitas, dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan produksi data.

Isi umum dari domain ini mencakup tahapan utama siklus statistik, yaitu:

- Perencanaan Data: Meliputi Pendefinisian Kebutuhan Data yang jelas, sumber data, serta metode pengumpulan dan pengolahan data yang akan digunakan.
- Pengumpulan, Pemeriksaan, dan Pengolahan Data: Panduan operasional untuk memastikan proses akuisisi dan pembersihan data dilakukan secara benar.
- Penyebarluasan Data: Tata cara diseminasi data statistik kepada masyarakat dan pengguna secara luas, yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

5.4 DOMAIN 4 - KELEMBAGAAN

Tujuan pembuatan buku pedoman pada domain 4 adalah untuk memperkuat peran institusi dan sumber daya manusia (SDM) dalam ekosistem statistik sektoral. Domain ini bertujuan menciptakan kelembagaan statistik yang profesional,

kolaboratif (sinergi antar-OPD), dan adaptif terhadap perkembangan statistik nasional dan daerah.

Isi umum dari domain ini berfokus pada:

- Profesionalitas: Penekanan pada Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dan kode etik dalam pengolahan data.
- Sumber Daya Manusia (SDM): Persyaratan dan peningkatan kapabilitas SDM yang bertanggung jawab atas statistik sektoral di setiap OPD.
- Pengorganisasian Statistik: Panduan mengenai kolaborasi antar-Produsen Data, Walidata, dan Pembina Data, serta peran aktif OPD dalam Forum Satu Data Indonesia untuk menjamin koordinasi data yang efektif.

5.5 DOMAIN 5 - STATISTIK NASIONAL

Tujuan pembuatan buku pedoman pada domain 5 adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik sektoral dalam mendukung seluruh siklus kebijakan pembangunan daerah. Domain ini memastikan bahwa data yang telah diproduksi benar-benar digunakan untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program, sehingga keputusan yang dibuat lebih berbasis bukti dan berdampak nyata.

Isi umum dari domain ini berfokus pada:

- Pemanfaatan Data Statistik: Panduan mengenai Penggunaan Data Statistik Dasar dan Statistik Sektoral untuk mendukung Perencanaan, Pemantauan (*Monitoring*), dan Evaluasi kebijakan dan program pembangunan.
- Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN): Menjelaskan peran strategis statistik sektoral daerah dalam kontribusi pada SSN yang berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi baru seperti *Big Data* untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih mendalam.

BAB VI.

SOP

Sistem Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten dalam laporan ini dianalisis dan disusun per indikator Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Penyusunan SOP per indikator ini bertujuan untuk menerjemahkan indikator dalam kerangka Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) ke dalam langkah kerja operasional yang terukur, jelas, dan dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pada masing-masing SOP memuat:

1. Dasar Hukum
2. Kualifikasi Pelaksana
3. Keterkaitan
4. Peralatan/Perlengkapan
5. Peringatan
6. Pencatatan dan Pendataan
7. Aktivitas
8. Pelaksana
9. Mutu Baku, seperti:
 - a. Persyaratan dan Perlengkapan
 - b. Waktu
 - c. Output
10. Keterangan

Hasil analisis per indikator ini dijadikan dasar untuk mengidentifikasi indikator yang telah memiliki SOP dan siap dijalankan maupun indikator yang masih perlu diperbaiki. SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan per Indikator disajikan pada Buku Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan.

BAB VII

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PORTAL SATU DATA KABUPATEN PASURUAN

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan merupakan dokumen operasional yang sistematis untuk mengarahkan pemanfaatan Portal Satu Data sebagai instrumen utama penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Pasuruan. Secara struktur, dokumen ini mencakup pengaturan mulai dari pendahuluan (latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup), ketentuan umum, kelembagaan dan peran, arsitektur dan fitur portal, proses bisnis pengelolaan data, penerapan standar dan metadata, pengaturan hak akses dan keamanan informasi, hingga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang seluruhnya ditutup dengan bab penutup yang menegaskan fungsi Petunjuk Teknis sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah.

Dari sisi *governance* dan kelembagaan, Petunjuk Teknis telah mengakomodasi peran aktor kunci Satu Data Indonesia dan EPSS: BPS Kabupaten Pasuruan diposisikan secara eksplisit sebagai Pembina Data, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata, Bapelitbangda sebagai koordinator Forum Satu Data, serta OPD sebagai Produsen Data yang di dalamnya dijelaskan rinci peran operator, surveyor, dan verifikator. Pengaturan ini menunjukkan bahwa rantai tata kelola statistik sektoral – mulai dari pembinaan standar, pengumpulan dan verifikasi data, pengelolaan portal, sampai forum koordinasi – telah diikat dalam satu kerangka yang jelas, sehingga memudahkan sinkronisasi peran antar lembaga dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan data di tingkat daerah.

Dari sisi teknis penyelenggaraan Portal Satu Data, isi Petunjuk Teknis telah menjabarkan arsitektur dan fitur portal secara cukup rinci. Portal dideskripsikan sebagai sistem terintegrasi yang mencakup halaman publik (beranda, publikasi data/eksplorasi data, capaian kinerja, dashboard statistik, data terbaru, dan kontak), serta submodul aplikasi internal bagi produsen data (manajemen akun, input dan unggah data, verifikasi, metadata dan daftar data, dashboard, API, laporan dan notifikasi). Alur pengguna bagi masyarakat umum dan OPD juga dijelaskan

langkah demi langkah, mulai dari akses beranda hingga publikasi data. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa Portal Satu Data tidak hanya menjadi etalase data, tetapi juga wahana kerja operasional yang mengikat proses input, verifikasi berjenjang, dan pemanfaatan data dalam satu siklus yang utuh.

Terakhir, aspek pemantauan, evaluasi, pengaturan hak akses, serta keamanan informasi juga sudah diakomodasi sehingga mendukung keberlanjutan dan keandalan penyelenggaraan statistik sektoral. Pengaturan klasifikasi keterbukaan data (terbuka, terbatas, rahasia), mekanisme pengelolaan akun dan peran pengguna, praktik keamanan informasi dan *backup* data, serta pemantauan terhadap keterisian, kualitas, dan pemanfaatan data menjadi landasan penting untuk menjaga kepercayaan dan mengurangi risiko penyalahgunaan data. Secara keseluruhan, Petunjuk Teknis ini dapat dinilai telah memberikan kerangka operasional yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam memanfaatkan Portal Satu Data sebagai tulang punggung pengelolaan statistik sektoral; penguatan ke depan dapat diarahkan pada penyusunan indikator kinerja yang lebih terukur per OPD dan integrasi eksplisit dengan dokumen perencanaan (RPJMD/RPD dan RKPD) sehingga pemanfaatan data dalam siklus perencanaan pembangunan semakin nyata dan terdokumentasi.

BAB VIII.

PENUTUP

Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 telah dilaksanakan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS), penguatan prinsip Satu Data Indonesia, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis data. Melalui pendampingan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Pasuruan dapat melaksanakan dengan lebih tertib, terstandar, dan berkelanjutan. Dokumen-dokumen yang mendukung kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan, seperti Rencana Aksi Satu Data, Pedoman Pelaksanaan Statistik Sektoral, SOP, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Portal Satu Data yang dihasilkan telah disajikan pada bab sebelumnya serta dilampirkan dalam laporan ini.

Demikian Laporan Hasil Pekerjaan Pendampingan Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 disusun. Diharapkan laporan ini beserta dokumen pendukungnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah yang berbasis data.

LAMPIRAN

Jadwal Kegiatan

Deskripsi		Minggu ke					
		1	2	3	4	5	6
Tahap 1 Persiapan							
1	a	Rapat Koordinasi Pendahuluan					
	b	Pembuatan Laporan Pendahuluan					
Tahap 2 Literasi dan Pengumpulan Bahan Kerja							
2	a	Pengumpulan data Rencana Aksi Satu Data					
	b	Pengumpulan data Rencana aksi pelaksanaan walidata statistik sektoral					
	c	Pengumpulan data Pedoman pelaksanaan statistik sektoral dan Standar Operasional Prosedur (SOP) per indikator yang ada di EPSS					
	d	Pengumpulan data Petunjuk teknis Pelaksanaan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan					
Tahap 3 Pelaksanaan Pendampingan							
3	a	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Satu Data					
	b	Koordinasi Penyusunan Rencana aksi pelaksanaan walidata statistik sektoral					
	c	Koordinasi Penyusunan Pedoman teknis pelaksanaan statistik sektoral dan Standar Operasional Prosedur (SOP) per indikator yang ada di EPSS					
	d	Koordinasi Penyusunan Petunjuk teknis Pelaksanaan Portal Satu Data Kabupaten Pasuruan					
Tahap 4 Pelaporan							
4	a	Pelaporan					
	b	Serah Terima Pekerjaan					